

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH KANTOR, PEMBIAYAAN UMKM
DAN PEMBIAYAAN NON UMKM BANK SYARIAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

DARMA TAUJIHARRAHMAN

NIM 1705036066

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Darma Taujiharrahan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

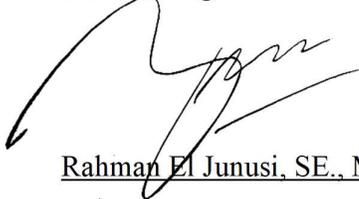
Nama : Darma Taujiharrahan
NIM : 1705036066
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **“Analisis Pengaruh Jumlah Kantor, Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan non UMKM Bank Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah (2014-2019)”**

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

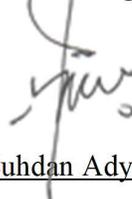
Semarang, 29 Juli 2020

Pembimbing I



Rahman El Junusi, SE., MM.
NIP. 19691118 200003 1 001

Pembimbing II



Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM.
NIP. 19840308 201503 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Suadara : Darma Taujiharrahan
NIM : 1705036066
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Jumlah Kantor, Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan Non UMKM Bank Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

14 Desember 2020

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Semarang, 30 Desember 2020

Ketua Sidang

Arif Afendi, S.E., M.Sc.
NIP. 19850526 201503 1 002

Sekretaris Sidang

Rahman El-Junusi, S.E., M.M.
NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji I

Dr. Ratno Agriyanto, CA., CPA.
NIP. 19800128 200801 1 010

Penguji II

Drs. H. Saekhu, M.H.
NIP. 19690120 199403 1 003



Pembimbing I

Rahman El-Junusi, S.E., M.M.
NIP. 19691118 200003 1 001

Pembimbing II

Zuhdan Ady Fataron, S.T., MM.
NIP. 19840308 201503 1 003

MOTTO

“Becik Ketitik Ala Ketara”

Kebaikan Kelihatan, Kejelekan Ketahuan

Setiap perbuatan yang baik pasti akan diketahui. Pun sebaliknya, perilaku busuk
cepat atau lambat juga pasti terungkap

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puja dan puji saya haturkan hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, kemudian shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya baik di dunia dan juga di akhirat. Dengan rasa syukur dan bahagia izinkan saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Darmuin dan Ibunda Kun Istiqomah yang selalu saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala Doa dan dukungan untuk saya. Perkenankan saya mempersembahkan skripsi ini untuk ayahanda dan ibunda tercinta, sebagai perwujudan rasa berterima kasih atas segala pengorbanan dan jerih payah ayahanda dan ibunda agar saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga dapat membahagiakan ayahanda dan ibunda tercinta.
2. Kakakku, Vina Darissurayya dan Muis Rijal Maulana yang selalu kubanggakan dan kusayangi, ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas doa dan dukungan selama ini untuk saya, tanpamu hari-hariku tak berwarna. Maaf jika belum bisa menjadi adik yang baik, semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Kampus hijauku tercinta UIN Walisongo Semarang tempatku berteduh dan mencari ilmu serta pengalaman, semoga lebih Berjaya, maju dan berkualitas.
4. Teman-temanku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2017 terkhusus kelas S1 Perbankan Syariah B yang selalu ada dalam suka ataupun duka.
5. Temanku Dhea Aulia Damayanti yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan tenaga agar aku dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai target yang diinginkan

DEKLARASI

Nama : Darma Taujiharrahan
NIM : 1705036066
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “**Analisis Pengaruh Jumlah Kantor, Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan non UMKM Bank Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah (2014-2019)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semarang, 10 Desember 2020

Deklarator

A green postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a serial number "80204AHF725342924", and the value "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A signature is written over the stamp.

Darma Taujiharrahan
NIM. 1705036066

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam skripsi karena pada umumnya terdapat istilah arab, nama orang, judul buku, nama Lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab dan disalin ke huruf latin. Untuk menjamin konsistensi perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اَي = ay

اَو = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda (ّ).

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al...* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah masih belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, disisi lain kondisi inklusi keuangan untuk mendorong industry yang disediakan oleh bank syariah menunjukan instabilitas pada beberapa variabel selama periode pengamatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Jumlah Kantor, Pembiayaan UMKM dan Non UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2014-2019. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi besar di Indonesia dengan berbagaimacam kekayaan alam, budaya dan potensi ekonomi yang berlimpah. Teknis analisis data menggunakan Analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan UMKM dan Non UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, Jumlah kantor tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Untuk itu diperlakukan penempatan alokasi dana pembiayaan kepada sector unggulan di provinsi serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan kantor pelayan bank syariah di Provinsi Jawa Tengah agar inklusi keuangan di Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Jumlah Kantor, Pembiayaan UMKM, Pembiayaan Non UMKM, Produk Domestik Regional Bruto

ABSTRACT

The growth of Gross Regional Domestic Product (PDRB) in Central Java Province still has not shown significant growth, on the other hand, the financial inclusion conditions to encourage the industry provided by Islamic banks show instability in several variables during the observation period. This study aims to analyze the effect of the number of offices, financing of MSMEs and non-MSMEs on the Gross Regional Domestic Product of Central Java Province during 2014-2019. Central Java Province is one of the major provinces in Indonesia with various kinds of natural, cultural and abundant economic potential. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with the classical assumption test.

The results showed that the financing of UMKM and Non-UMKM had a significant positive effect on GRDP. The number of offices did not have a significant effect on GRDP. For this reason, it is treated the placement of the allocation of financing funds to the leading sectors in the province as well as increasing the effectiveness and efficiency in the utilization of Islamic bank service offices in Central Java Province so that financial inclusion in Central Java Province can have a significant impact on economic growth.

Keywords: *Number of Offices, UMKM Financing, Non-UMKM Financing, Gross Regional Domestic Product*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam penulis panjatkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH JUMLAH KANTOR, PEMBIAYAAN UMKM DAN PEMBIAYAAN NON UMKM BANK SYARIAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat mencapai gelar Sarjana S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Heny Yuningrum, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Rahman El Junusi, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing I dan Zuhdan Ady Fataron, S.T., M.M. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
5. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku wali dosen yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di universitas

6. Segenap dosen beserta karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama kuliah.
7. Perpustakaan Bank Indonesia dan perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah menunjang dengan buku-buku pengetahuan yang dapat digunakan referensi dalam penulisan skripsi.
8. Untuk teman-teman seperjuangan S1 Perbankan Syariah angkatan 2017 khususnya PBAS B, yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas semangat, doa dan dukungan selama perkuliahan.
9. Saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, dan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal baik mereka di catat oleh Allah SWT, dan diberikan ganti yang terbaik oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan peneliti semoga apa yang terkandung di dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 13 Desember 2020



Darma Taujiharrahan

NIM. 1705036066

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah.....	15

2.1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
2.1.2 Faktor-faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	17
2.1.2.1 Pembiayaan Bank Syariah	17
2.1.2.2 Investasi	18
2.1.2.3 Akses Lembaga Keuangan Syariah	20
2.2 Kantor Bank Syariah di Provinsi Jawa Tengah.....	20
2.2.1 Definisi Kantor Bank Syariah.....	20
2.2.2 <i>Digital Banking</i> (Kantor Layanan Bank Dalam Bentuk Digital)	22
2.2.3 Arti Penting Kantor Pelayanan Bank Syariah	23
2.3 Pembiayaan Bank Syariah Kepada UMKM dan Non UMKM di Provinsi Jawa Tengah	24
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Syariah.....	24
2.3.2 Arti Penting Pembiayaan Bank Syariah	26
2.3.3 Praktek Pembiayaan Bank Syariah	27
2.3.3 Pembiayaan UMKM dan Non UMKM.....	30
2.4 Penelitian Terdahulu.....	32
2.5 Kerangka Pemikiran Teoritik.....	38
2.6 Hipotesis Penelitian	40
2.6.1 Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.....	41
2.6.2 Pengaruh Pembiayaan UMKM terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah 41	
2.6.3 Pengaruh Pembiayaan Non UMKM terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.....	42
BAB III	44
METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Sumber Data.....	45

3.3 Populasi.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Variabel Penelitian	46
3.6 Teknis Analisis Data.....	47
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	47
3.6.1.1 Uji Normalitas	47
3.6.1.2 Uji Autokorelasi	48
3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas	49
3.6.1.4 Uji Multikolinearitas.....	50
3.6.2 Analisis Regresi Liner Berganda	50
BAB IV	52
PEMBAHASAN.....	52
4.1 Deskripsi Data.....	52
4.1.1 Jumlah Kantor Bank Syariah.....	52
4.1.2 Pembiayaan UMKM	53
4.1.3 Pembiayaan Non UMKM.....	53
4.1.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah.....	53
4.2.1 Uji Normalitas.....	53
4.2.2 Uji Autokorelasi.....	55
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.2.4 Uji Multikolinearitas	58
4.3 Regresi Linear Berganda	59
4.4 Uji Hipotesis	61
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	61
4.4.2 Uji Simultan (f).....	62
4.4.3 Uji Parsial (t).....	62
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian	64

4.5.1 Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah di Jawa Tengah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah	64
4.5.2 Pengaruh Pembiayaan UMKM di Jawa Tengah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah	67
4.5.3 Pengaruh Pembiayaan Non UMKM di Jawa Tengah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah	68
BAB V.....	70
PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Keterbatasan Penelitian	70
5.3 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Tahun 2014 - 2019) Milyar Rupiah.....	3
Tabel. 1.2: Total Pembiayaan Bank Syariah Provinsi Jawa Tengah Per-triwulan (Tahun 2014 - 2019) Milyar Rupiah.....	9
Tabel 2.1: Perbedaan Antara Pembiayaan Ritel dan Pembiayaan <i>Wholesale</i>	29
Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1: Hasil Uji Deskriptif Data.....	52
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi.....	56
Tabel 4.4 Uji Glesjer.....	58
Tabel 4.5: Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.6: Hasil Uji Regresi Linear Berganda	60
Tabel 4.7: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	61
Tabel 4.9: Hasil Uji F.....	62
Tabel 4.8 Hasil Uji T	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5.1 Model Konseptual.....	39
Gambar 2.5.2: Kerangka Pemikiran Teoritik	40
Gambar 3.1: Pengukuran Durbin Waston.....	48
Gambar 4.1: Grafik Normal Probability Plot.....	54
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1: Jumlah Kantor Bank Syariah BUS dan UUS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019	7
Grafik 1.2: Perubahan Indeks Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBM) dan Industri Manufaktur Kecil dan Mikro (IKM) <i>q-to-q</i> Provinsi Jawa Tengah per Triwulan Tahun 2015-2019 (persen).....	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Jumlah Kantor Bank Syariah, Jumlah Pembiayaan UMKM, Jumlah Pembiayaan non UMKM dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019 (per triwulan).....	78
Lampiran 2: Hasil Uji Deskriptif Data.....	79
Lampiran 3: Hasil Uji Normalitas	80
Lampiran 4: Hasil Uji Autokorelasi	80
Lampiran 5: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	81
Lampiran 6: Hasil Uji Multikolinearitas.....	82
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	82
Lampiran 8: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	82
Lampiran 9: Hasil Uji Simultan (F).....	83
Lampiran 10: Hasil Uji Parsial (t)	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan memiliki peran besar dalam mewujudkan inklusi keuangan yang mana merupakan suatu usaha untuk menekan kenaikan tingkat kemiskinan serta mendukung pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Inklusi keuangan menjamin tersedianya akses keuangan yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat mulai dari masyarakat kalangan bawah hingga masyarakat kalangan atas baik masyarakat perkotaan hingga masyarakat pedesaan sekalipun. Indikator inklusi keuangan sebagaimana dalam penelitian Khairul Anwar (2017) digambarkan dengan banyaknya kantor lembaga pelayanan keuangan sebagai wujud dari aksesibilitas dan banyaknya jumlah pembiayaan sebagai wujud dari kemanfaatan yang disalurkan kepada masyarakat pada daerah tersebut. Ketersediaan akses keuangan bagi seluruh kalangan masyarakat dapat menjadi solusi dalam kebutuhan berbagai macam jasa keuangan diantaranya seperti tabungan atau simpanan, transfer, pinjaman, investasi hingga permodalan. Menurut R.F. Harrod¹ dan Evsey Domar² sebagai penggagas model pertumbuhan ekonomi yang sering dikenal dengan sebutan *Harrod - Domar Model* berpendapat bahwa pembangunan daerah memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya investasi dan akses permodalan, ia memandang bahwa perlu adanya perubahan sikap masyarakat berbudaya tradisional menuju masyarakat yang lebih rasional, industrial dan berfokus pada ekonomi³. Model tersebut menerangkan betapa pentingnya investasi serta akses permodalan untuk menunjang terciptanya produktivitas usaha. Berdasarkan model tersebut masyarakat diharuskan untuk bisa mandiri dan produktif dalam

¹ Sir Henry Roy Forbes Harrod 1900 – 1978 adalah seorang ekonom Inggris yang mempelopori bidang ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Lihat: Adam Augustyn, Patricia Bauer, dkk, "Sir Roy Harrod British Economist," *Britannica* (Britannica, n.d.), <https://www.britannica.com/biography/Roy-Harrod>.

² Evsey Domar 1914 – 1997 adalah presiden dari Asosiasi Ekonomi Komparatif dan anggota dari beberapa organisasi akademis lainnya termasuk Akademi Seni dan Sains Amerika, Masyarakat Ekonometrik, dan Pusat Studi Lanjut dalam Ilmu Perilaku. Lihat: "Evsey D. Domar 1914-1997," *THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT WEBSITE* (hetwebsite.net, n.d.), <https://www.hetwebsite.net/het/index.htm>.

³ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), h. 14.

memenuhi kebutuhan ekonomi untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Dalam mendukung terwujudnya inklusi keuangan di negara kesatuan republic Indonesia, pemerintah melalui lembaga keuangan perbankan diharuskan memberikan akses keuangan yang mudah dan menyeluruh agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Dalam peraturan menteri keuangan nomor 10/PMK.05/2009 tentang fasilitas penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dan peraturan bank Indonesia nomor 17/12/PBI/2015 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah telah memberikan kepastian kebijakan untuk mendukung terciptanya iklim akses keuangan inklusif yang disediakan oleh lembaga perbankan demi mendukung pembangunan daerah.

Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan negara Indonesia mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan negara Indonesia mencapai 76,19 persen yang meningkat jika dibandingkan dengan survey tahun 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen⁴, berdasarkan survey tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam tiga tahun terakhir pada indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan negara Indonesia yang berarti telah terjadi perbaikan fasilitas keuangan, meski begitu Presiden Republik Joko Widodo (2020) menyampaikan bahwa indeks keuangan inklusif masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura yang telah mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen dan Thailand 82 persen⁵. Dari segi pengaruhnya terhadap pertumbuhan perkonomian negara yang diukur melalui produk domestic bruto (PDB), inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) negara Indonesia⁶, hal ini

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *SP 58/DHMS/OJK/XI/2019 SIARAN PERS SURVEI OJK 2019: INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MENINGKAT*, 2019, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat.aspx>.

⁵ Dewi Nurita, "Jokowi Soroti Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan RI Yang Rendah," *Tempo.Co*, January 28, 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1300621/jokowi-soroti-indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-ri-yang-rendah/full&view=ok>.

⁶ Joko Susilo, Ratnawati Nirdukita, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB): Analisis Sektoral Tahun 2006-

telah dibuktikan pada beberapa penelitian seperti milik Joko Susilo (2015), Sinta Rani (2016)⁷ dan Khairul Anwar (2017). Oleh karena itu urgensi inklusi keuangan menjadi perkara yang sangat penting dan harus diusahakan secara menyeluruh oleh seluruh kalangan pemerintahan baik dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah.

Dalam suatu daerah atau provinsi, pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan indikator Produk domestik regional bruto (PDRB).

Tabel. 1.1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Tahun 2014 - 2019) Milyar Rupiah.

Tahun	PDRB ADHK 2010	Laju Pertumbuhan (Persen)
2014	764.959,15	+5,27
2015	806.765,09	+5,47
2016	849.099,35	+5,25
2017	893.750,44	+5,26
2018	941.164,12	+5,32
2019	992,105,79	+5,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (jateng.bps.go.id)

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 29 kabupaten serta 6 kota madya, beribukota di Kota Semarang yang terletak di pulau Jawa dengan luas 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dengan jumlah penduduk berdasarkan data sensus 2010 sebesar 32,7 juta jiwa atau sekitar 14 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi yang kaya akan budaya, dialektika dan memiliki berlimpah

2013," *Seminar Nasional Cendekiawan* (2015); Sinta Rani Siti Sarah, Sumiyarti, "Pengaruh Penyaluran Dana Bank Konvensional Dan Bank Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia," *Media Ekonomi* 24, no. 2 (2016); Khairul Anwar, Amri, "PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PDB INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unsyiah* 2, no. 3 (2017).

⁷ Rani Siti Sarah, Sumiyarti, "Pengaruh Penyaluran Dana Bank Konvensional Dan Bank Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia."

kekayaan sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerahnya, setidaknya ada sekitar 17 cagar budaya yang tersebar di provinsi tersebut diantaranya adalah masjid agung Demak, masjid menara Kudus, candi Borobudur Magelang, situs manusia purba Sangiran Sragen dan lain sebagainya⁸. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 2 Provinsi Jawa Tengah berhak dalam mengatur kebijakan di daerahnya (hak otonomi)⁹. Provinsi Jawa Tengah juga merupakan salah satu penyangga pangan nasional khususnya tanaman padi, tercatat pada tahun 2013 luas panen padi di Jawa Tengah sebesar 1,6 juta hektar yang dapat menghasilkan 9 juta ton beras, selain padi provinsi Jawa Tengah juga dapat menghasilkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan berbagaimacam sayuran dan buah-buahan seperti bawang merah, bawang putih, kentang, kubis cabai, tomat wortel durian, papaya, salak, semangka dan lain-lain¹⁰. Beberapa kota juga memiliki potensi peternakan dan perikanan yang cukup baik seperti Jepara, Pati, Tegal, Pemalang sebagai penghasil ikan air asin, kemudian Banyumas, Banjarnegara, dan Magelang sebagai penghasil ikan air tawar, serta peternakan yang secara merata dapat dibudidayakan di seluruh wilayah Jawa Tengah¹¹. Selain itu sumber daya alam seperti batubara, logam, non logam, minyak dan gas bumi juga terletak di beberapa daerah seperti Brebes, Tegal, Pati, Kebumen, Purworejo, dan Cilacap¹² tak ketinggalan fasilitas perhubungan dan industry pengolahan juga banyak tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, pada tahun 2018 struktur perekonomian Jawa Tengah terdiri dari 10,73 persen konstruksi, 14,04 pertanian, 34,50 persen industry, 13,51 persen perdagangan dan 27,22 persen lainnya¹³. Selain kekayaan alam dan industry besar, provinsi Jawa Tengah juga

⁸ Moh Farukhi, *Mengenal 34 Provinsi Indonesia: Jawa Tengah* (Surakarta: Sinergi Prima Magna, 2018).h. 111.

⁹ Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, Dessy Noor Farida, "The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019).

¹⁰ *Ibid*, h. 106.

¹¹ *Ibid*, h. 121-123.

¹² *Ibid*, h. 131-137.

¹³ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*, 2019, <https://jateng.bps.go.id/publication/2019/07/05/bdea44fd01ce6dcde19fec6c/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-jawa-tengah-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html>.

memiliki pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang cukup pesat, tercatat pada dinas koperasi dan UMKM provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 triwulan I jumlah UMKM binaan provinsi Jawa Tengah terdapat 136.207 unit yang berhasil menyerap tenaga kerja sampai 933.989 jiwa dengan omset yang mencapai 50.068 miliar rupiah¹⁴. Kekayaan alam dan budaya provinsi Jawa Tengah yang sungguh sangat berlimpah menjadikannya memiliki potensi ekonomi yang cukup lengkap pada seluruh sector bidang mulai dari sector bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, hingga energy, sumber daya mineral, industry kreatif, manufaktur hingga industri jasa dan pariwisata. Namun, dengan segala macam kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang didasarkan pada jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih terbilang cukup rendah, pada tahun 2018 tercatat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 941.164,12 miliar rupiah dengan rata-rata laju pertumbuhan selama 5 tahun mulai 2014 sampai dengan 2018 adalah 5,31 persen dengan tingkat laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 5,47 persen, jika dibandingkan dengan lima provinsi tetangganya telah dapat mencapai rata-rata laju pertumbuhan PDRB 2014-2018 yang lebih tinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 6,01 persen, Jawa Timur sebesar 5,57 persen, Banten 5,56, Jawa Barat sebesar 5,35 persen, dan DI Yogyakarta sebesar 5,32 persen¹⁵. Selain itu, secara nominal Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 cukup rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki luas daerah yang tidak jauh berbeda seperti Jawa Barat yang mencapai total PDRB 2018 sebesar Rp 1.419.689,12 miliar dan provinsi Jawa Timur Rp 1.563.756,37 miliar¹⁶.

¹⁴ Dinkop-UMKM Provinsi Jawa Tengah, *Data Koperasi & UMKM Triwulan I 2018*, 2018, <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/content/index/2/73/6/data-koperasi-umkm>.

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Seri 2010: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi 2010-2018*, 2019, <https://www.bps.go.id/dynamic/2015/10/07/956/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-2018-miliar-rupiah-.html>.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Seri 2010: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi 2010-2018*, 2019, <https://www.bps.go.id/dynamic/2015/10/07/956/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-2018-miliar-rupiah-.html>.

Beberapa penelitian diantaranya oleh Purwanto (2017), Nurlaili (2016), Zaini (2015) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah provinsi yang diukur melalui produk domestik regional bruto (PDRB) secara signifikan dipengaruhi oleh adanya akses permodalan dan pembiayaan yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan diantaranya seperti perbankan¹⁷. Menurut Khairul Anwar (2017) upaya pembangunan sector keuangan perbankan dapat menjadi faktor kuat sebagai akses permodalan melalui penyaluran pembiayaannya kepada sector usaha dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB daerah¹⁸, untuk itu lembaga keuangan perbankan dituntut untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menghadirkan iklim akses keuangan yang inklusif. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan adanya analisa tentang kualitas akses permodalan dan pembiayaan di Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel yang berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian provinsi.

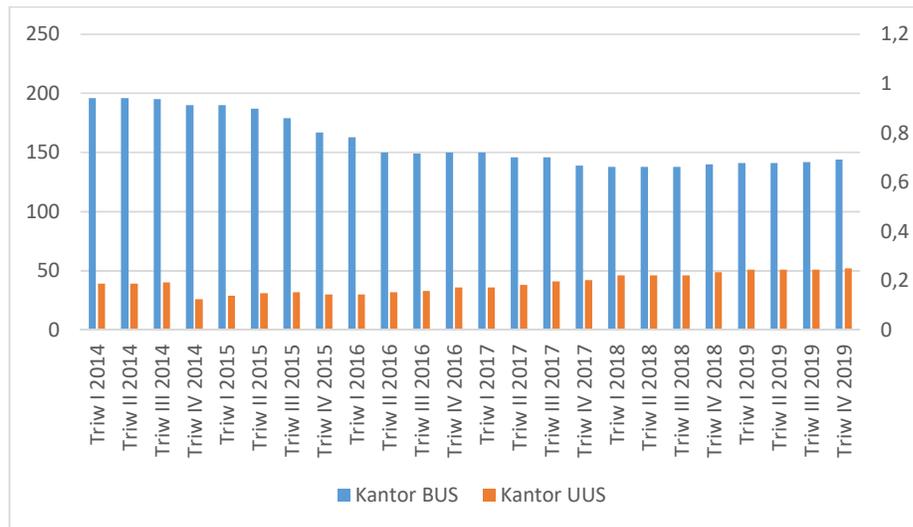
Mulai tahun 1992 sejak terbitnya UU nomor 7 Tahun 1992 dan berdirinya Bank Muammalat Indonesia (BMI) secara resmi Indonesia telah memiliki sistem perbankan baru yaitu sistem Perbankan Syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak surplus dan pihak deficit yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah. Kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat memberikan iklim keuangan yang lebih adil dengan varian produk simpanan, investasi dan pembiayaan yang lebih banyak dan menghindari adanya praktek riba yang diharamkan oleh agama Islam. Dalam segi operasionalnya bank syariah berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), selain itu pedoman terkait pelaksanaan operasional bank syariah juga diatur pada Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk Bank Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) untuk Bank Syariah, Peraturan OJK (POJK) untuk Bank Syariah,

¹⁷ Purwanto, "Kontribusi Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Pulau Jawa Dan Sumatra Tahun 2012 – 2016," *Iqtidhadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2017); Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, "Pengaruh Alokasi Pembiayaan Sektor – Sektor Ekonomi Oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur (Periode Triwulan Tahun 2010-2015)," *el-Qist* 6, no. 2 (2016); Zaini Ibrahim, "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Banten," *Jurnal Islamiconomic* 6, no. 1 (2015).

¹⁸ Anwar, Amri, "PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PDB INDONESIA."

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK) dan regulasi internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* AAOIFI dan *Islamic Financial Services Board* IFSB Standard, secara internal Bank Syariah juga memiliki kebijakan, Buku Pedoman Perusahaan (BPP), Standard Operating Procedure (SOP), serta Dewan Pengawas Syariah (DPS)¹⁹. Tetap bertahannya Bank Syariah pada krisis moneter tahun 1998 menjadikan beberapa perusahaan bank konvensional terdorong untuk mendirikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berdasarkan data pada Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 tercatat ada 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia yang merupakan wujud dari perkembangan industry keuangan syariah. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan (OJK) pada Desember 2019 tercatat ada 196 kantor bank syariah tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Grafik 1.1: Jumlah Kantor Bank Syariah BUS dan UUS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019



Sumber : Statistik Perbankan Syariah tahun 2014 - 2019

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa jumlah kantor bank syariah di provinsi Jawa Tengah terus berfluktuatif namun cenderung menurun, mulai tahun 2014 sampai 2019 tercatat jumlah kantor bank syariah di provinsi Jawa Tengah terus

¹⁹ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.). h. 4-5.

mengalami penurunan sebanyak 20 kantor, dari semula 235 unit kantor pada triwulan I 2014 menjadi 196 unit kantor pada triwulan IV 2019. Menurut Wimboh Santoso (2019) selaku Ketua Dewan Komisiner OJK penurunan ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan dapat dijangkau masyarakat luas, menurutnya upaya bank dalam meningkatkan pelayanan dengan membuka kantor pelayanan baru sudah tak lagi efektif, namun hanya akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk beroperasi secara optimal²⁰, akan tetapi penelitian oleh Dita Meliyana (2017) dan Rizki Aulia Rachman (2013) menjelaskan bahwa jumlah kantor bank syariah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat deposito mudharabah bank syariah sedangkan menurut hasil penelitian Nurul Fitri (2017) di Pasar Induk Wonomulyo tentang pemanfaatan internet banking dan ATM dalam kegiatan usaha tidaklah berpengaruh secara signifikan, hal tersebut disebabkan oleh karena sebagian besar dari pelaku UMKM disana menggunakan jasa anak-anak atau remaja yang tidak bersekolah untuk menjaga tokonya. Menurut kedua penelitian tersebut, pengadaan akses keuangan melalui jaringan digital dalam rangka meluaskan pangsa pasar ke pedesaan dan pelaku UMKM harus diikuti dengan pelatihan dan sosialisasi agar seluruh pihak dapat memanfaatkannya²¹, sehingga muncul dua persepsi yang saling bertentangan tentang manfaat serta kontribusi jaringan kantor bank syariah dalam menghadirkan pelayanan keuangan syariah yang inklusif bagi seluruh kalangan masyarakat. Satu sisi menyampaikan pentingnya jumlah kantor bank syariah dan disisi lain menganggap bahwa penambahan jumlah kantor sebagai upaya memperlebar pasar tidak lagi efektif.

Walaupun masih tergolong baru, bank syariah sudah memulai kontribusinya tidak hanya sebagai penghimpun dana namun juga sebagai akses permodalan dengan menyalurkan pembiayaan pada sector usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha non UMKM di provinsi Jawa Tengah. Pembiayaan bank syariah yang disalurkan pada sector usaha di provinsi Jawa Tengah cukup

²⁰ Elisa Valenta, "Semakin Sepi Peminat, Jumlah Kantor Cabang Bank Menurun," *Beritagar.Id*, last modified November 18, 2019, accessed May 6, 2020, <https://beritagar.id/artikel/berita/semakin-sepi-peminat-jumlah-kantor-cabang-bank-menurun>.

²¹ Nurul Fitri dan Nur Qamariah, "PEMANFAATAN INTERNET BANKING DAN AUTOMATIC TELLER MACHINE TERKAIT PENINGKATAN USAHA OLEH PELAKU UMKM PASAR INDUK WONOMULYO," *Sebatik* 23, no. 2 (2019).

menunjukkan angka yang berfluktuatif namun cenderung meningkat, akan tetapi jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, total pembiayaan di provinsi Jawa Tengah tetap menjadi yang terendah dan bila dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah masih cukup tertinggal jauh. Tercatat pada akhir 2019 total pembiayaan yang disalurkan bank syariah di provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 20.341,4 miliar rupiah, sedangkan total kredit yang disalurkan bank konvensional di Jawa Tengah mencapai 418.055,3 miliar rupiah atau sekitar 20 kali lipat pembiayaan bank syariah. Hal ini tidak lain disebabkan besaran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki bank syariah masih jauh dari bank konvensional, tercatat total DPK bank syariah pada akhir 2019 adalah 20.923,73 miliar rupiah sedangkan total DPK bank konvensional pada akhir 2019 mencapai 305.631,39 miliar rupiah.

Tabel. 1.2: Total Pembiayaan Bank Syariah Provinsi Jawa Tengah Per-triwulan (Tahun 2014 - 2019) Miliar Rupiah.

Tahun	Triwulan	UMKM	non UMKM	Total	Laju %
2014	I	7.216,670	3.627,816	10.844,49	1,76
	II	4.348,677	7.027,180	11.375,86	5,31
	III	3.776,670	7.888,500	11.665,17	2,89
	IV	4.099,120	7.678,060	11.777,18	1,12
2015	I	4.015,130	7.658,170	11.673,30	-1,04
	II	3.899,430	8.313,520	12.212,95	5,40
	III	4.181,860	8.207,310	12.389,17	1,76
	IV	4.750,210	8.158,650	12.908,86	5,20
2016	I	5.035,540	8.430,580	13.466,12	5,57
	II	5.296,000	8.912,230	14.208,23	7,42
	III	5.178,750	9.071,460	14.250,21	0,42
	IV	5.523,757	9.463,767	14.987,52	7,37
2017	I	5.425,692	9.770,322	15.196,01	2,08
	II	5.643,983	10.304,593	15.948,58	7,53
	III	5.608,810	10.509,221	16.118,03	1,69

	IV	5.349,573	11.570,389	16.919,96	8,02
2018	I	5.206,074	12.396,466	17.602,54	6,83
	II	5.379,498	12.881,437	18.260,94	6,58
	III	5.294,624	13.760,352	19.054,98	7,94
	IV	5.160,388	14.481,674	19.642,06	5,87
2019	I	5.263,391	14.114,763	19.378,15	-2,64
	II	5.499,690	14.617,847	20.117,54	7,39
	III	5.166,115	14.664,240	19.830,36	-2,87
	IV	5.625,699	14.715,722	20.341,42	5,11

Sumber : Statistik Perbankan Syariah tahun 2014 - 2019

Pada 6 tahun terakhir terhitung total pembiayaan bank syariah tumbuh dengan laju pertumbuhan terbesar pada tahun 2018 triwulan III *q to q* 7,94 persen dengan rata-rata pertumbuhan per triwulan selama 6 tahun sebesar 4,03 persen.

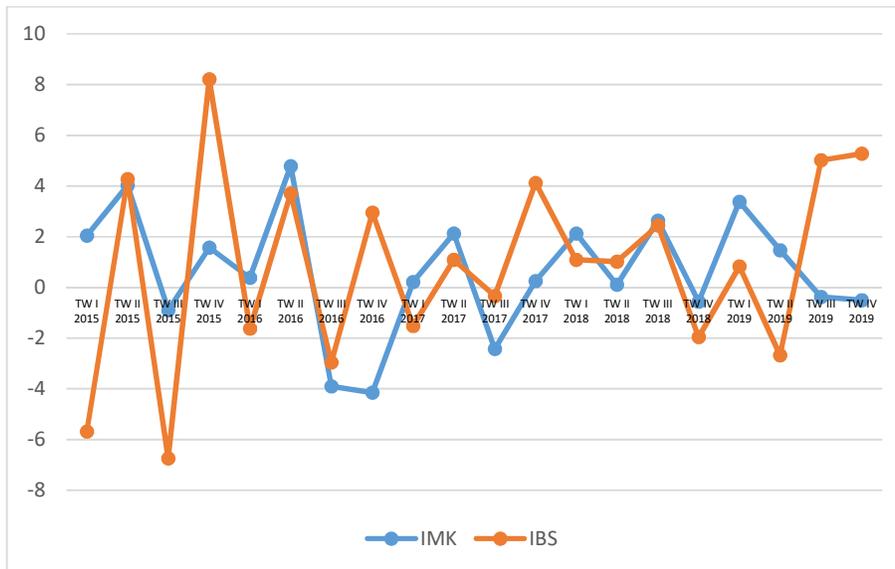
Saat ini pembiayaan ritel adalah sector andalan dalam penyaluran pembiayaan di Bank Syariah sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur utama bank syariah bukopin Jeffery Zhufran Carlous dan Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan BSM Putu Rahwidhiyasa bahwa segmen ritel masih menjadi focus sekaligus andalan dalam penyaluran pembiayaan Bank Syariah²², sehingga melihat dunia usaha yang semakin berkembang pada sector UMKM seharusnya berpotensi mendorong pertumbuhan produksi daerah yang lebih tinggi lagi. Dinas Koperasi dan UMKM mencatatkan pada triwulan IV tahun 2018 jumlah UMKM binaan provinsi Jawa Tengah mencapai jumlah 143.738 unit bertambah 2.870 unit atau 2,04 persen secara *q-to-q* dari triwulan III 2018 dan secara *y-to-y* meningkat 10.059 unit atau 7,5 persen dari triwulan IV tahun 2017²³. Kemudian Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah juga mencatatkan indeks pertumbuhan produksi (*q-to-qo*) industry manufaktur mikro dan kecil (IMK) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Perubahan indeks tertinggi

²² Lalu Rahadian, "2020, Bank Syariah Memilih Pembiayaan Sektor Ritel," *Bisnis.Com*, last modified 2020, accessed June 1, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20200106/90/1187298/2020-bank-syariah-memilih-pembiayaan-sektor-ritel>.

²³ Dinkop-UMKM Provinsi Jawa Tengah, *Data UMKM Binaan Triwulan IV 2018*, 2018.

terjadi pada triwulan II-2016 yaitu naik sebesar 4,78 persen dan mengalami penurunan terendah sebesar 4,15 persen pada triwulan IV-2016²⁴. Seiring dengan pertumbuhan UMKM secara kuantitas maupun produksi di Provinsi Jawa Tengah, alokasi pembiayaan Bank Syariah pada sector UMKM masih stag di sekitar 5,4 *trilyun* dengan rata-rata pertumbuhan fluktuatif 4% per tahun, bahkan secara *q-to-q* pembiayaan pada sector UMKM tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berbeda dengan total kredit UMKM yang telah disalurkan oleh Bank Konvensional di Jawa Tengah yang tumbuh dengan rata-rata 11% per tahun dan tercatat mencapai 120 *trilyun rupiah* pada akhir 2019.

Grafik 1.2: Perubahan Indeks Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBM) dan Industri Manufaktur Kecil dan Mikro (IMK) *q-to-q* Provinsi Jawa Tengah per Triwulan Tahun 2015-2019 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (www.bps.jateng.go.id)

Selain itu, pertumbuhan indeks produksi (*q-to-q*) pada industry manufaktur besar dan sedang (IBS) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) juga bergerak fluktuatif dan mencapai puncaknya pada triwulan IV-2015 yang mengalami kenaikan sebesar 8,21 persen sedangkan penurunan terbesar terjadi pada triwulan

²⁴ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *PERKEMBANGAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR KECIL DAN MIKRO PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2019*, 2019.

III-2015 sebesar 6,75 persen²⁵. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mencatatkan tahun 2018 sebanyak 4.745 jumlah industri manufaktur besar dan sedang berada di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan jumlah industri baik UMKM maupun non UMKM yang cukup pesat seharusnya disertai dengan akses keuangan yang lebih baik lagi. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah baik dengan sistem bagi hasil maupun jual beli sangat relevan dengan kegiatan bisnis yang sangat lentur atau fleksibel, namun pada tahun-tahun tersebut total pembiayaan khususnya yang disalurkan kepada UMKM cenderung stagnan dan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan sedangkan pada pembiayaan non UMKM yang memiliki tumbuh cukup baik. Dalam kasus ini timbul pertanyaan apakah akses kantor serta penyaluran pembiayaan Bank Syariah baik kepada sector UMKM ataupun kepada sector non UMKM telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industry di Provinsi Jawa Tengah?

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian yang berjudul “*Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah dan Penyaluran Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan non UMKM Bank Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah (2014-2019)*” ini ingin menjelaskan tentang apakah akses terhadap bank syariah sebagai salah satu lembaga penyedia jasa keuangan yang berperan dalam memberikan akses permodalan melalui penyaluran pembiayaan kepada unit-unit usaha baik UMKM maupun non-UMKM di provinsi Jawa Tengah telah memiliki pengaruh dan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di provinsi Jawa Tengah yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah jumlah kantor bank syariah berpengaruh terhadap produk domestic regional bruto (PDRB) provinsi Jawa Tengah?

²⁵ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *PERKEMBANGAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR BESAR DAN SEDANG PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2019*, 2019.

2. Apakah total pembiayaan UMKM bank syariah di provinsi Jawa Tengah berpengaruh terhadap produk domestic regional bruto provinsi (PDRB) Jawa Tengah?
3. Apakah total pembiayaan non UMKM bank syariah di provinsi Jawa Tengah berpengaruh terhadap produk domestic regional bruto provinsi (PDRB) Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah jumlah kantor bank syariah berpengaruh terhadap produk domestic regional bruto (PDRB) provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui apakah total pembiayaan UMKM bank syariah di provinsi Jawa Tengah berpengaruh terhadap produk domestic regional bruto provinsi (PDRB) Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui apakah total pembiayaan non UMKM bank syariah di provinsi Jawa Tengah berpengaruh terhadap produk domestic regional bruto provinsi (PDRB) Jawa Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis: agar penulis dapat mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah.
2. Bagi UIN Walisongo: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan UIN Walisongo Semarang sebagai tempat menggali ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peran bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Bagi Pemerintah Daerah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pelayanan Bank Syariah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Bagi Bank Syariah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan Bank Syariah dalam menentukan kebijakan pengembangan asset dan pengalokasian pembiayaan bank syariah.

5. Bagi Pembaca: Hasil ini dapat menjadi patokan untuk melihat manfaat dan kontribusi nyata bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di provinsi Jawa Tengah sehingga menumbuhkan rasa percaya bagi masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk bisa memahami struktur penulisan penelitian, maka disusun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA berisi tentang kajian teori tentang kantor bank, pembiayaan UMKM dan non UMKM Bank Syariah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang jenis dan sumber data populasi, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN berisi tentang hasil pengujian variabel dan pembahasannya

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh proses penelitian, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya yang diukur berdasarkan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita yang erat dengan aktivitas lapangan usaha²⁶, pembangunan ekonomi diupayakan untuk mewujudkan adanya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Para ahli ekonomi baik nasional maupun dunia meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator untuk menilai kemajuan perekonomian suatu daerah²⁷, di Negara Kesatuan Republik Indonesia pembangunan ekonomi menjadi tanggungjawab dari pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi warganya, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakatnya guna menaikkan pendapatan riil negara atau daerah tersebut. Salah satu tanggungjawab pemerintah dalam mengupayakan pembangunan ekonomi adalah dalam hal pembangunan infrastruktur baik berupa akses jalan, akses transportasi, akses jaringan hingga akses permodalan yang berpotensi mendukung produktivitas ekonomi di wilayah tersebut²⁸. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 2 telah ditetapkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini adalah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing masyarakat²⁹. Berdasarkan teori pembangunan Goldsmith (1969) Pembangunan ekonomi memiliki hubungan erat dengan

²⁶ Wiguna Van Indra, Rachmad Kresna Sakti, "ANALISIS PENGARUH PDRB, PENIDIKAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2010," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, FEB* 1, no. 2 (2012). h. 3.

²⁷ Sirilius Seran, , *Pendidikan & Pertumbuhan Ekonomi Versus Kemiskinan Penduduk: Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016). H. 113.

²⁸ *Ibid.* h. 113.

²⁹ Dewan Perwakilan Rakyat, *UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah: Pasal 2 Ayat 2-3, 2004*, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.

struktur keuangan (*financial structure*) yang memiliki peran dalam memobilisasi pergerakan dana dari pihak kelebihan kepada pihak kekurangan dana³⁰. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat digambarkan dengan jumlah output barang dan jasa yang menjadi dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut, peningkatan PDRB menggambarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, sebaliknya penurunan PDRB menggambarkan keadaan pertumbuhan ekonomi daerah yang ikut menurun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada pada suatu daerah tertentu, atau dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas seluruh unit ekonomi pada daerah tersebut³¹. Unit-unit usaha tersebut dikelompokkan kedalam 17 lapangan usaha atau sektor yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik dan gas, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (17) Jasa-jasa lainnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah pada periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan atau pada saat itu, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga konstan atau harga yang berlaku pada satu periode atau satu tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui, sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui

³⁰ Anwar, Amri, "PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PDB INDONESIA." H. 456.

³¹ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*.

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi faktor harga³².

2.1.2 Faktor-faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Mewujudkan pertumbuhan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidaklah merupakan perkara sederhana yang mudah diselesaikan, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagaimacam faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB):

2.1.2.1 Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan penelitian oleh Joko Susilo (2015) menjelaskan bahwa pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), hal tersebut diartikan bahwa semakin tinggi pembiayaan bank syariah yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula tingkat PDB yang dihasilkan. Pada dasarnya PDB dan PDRB memiliki arti yang sama hanya saja berbeda dalam cangkupan wilayah, PDB menggambarkan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah nasional selama satu tahun sedangkan PDRB hanya sebatas pada wilayah provinsi. Untuk itu pada penelitian Purwanto (2017) menjelaskan bahwa kontribusi bank syariah melalui penyaluran pembiayaan syariah di Pulau Jawa dan Sumatra pada tahun 2012-2016 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa dan Sumatra. Selanjutnya pada penelitian Faiza (2016) bahwa berdasarkan pembiayaan bank syariah yang disalurkan ke beberapa sector usaha yaitu industry pengolahan dan konstruksi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PDRB di provinsi Jawa Timur, akan tetapi beberapa pembiayaan pada sector lain tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Jawa Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh

³² Bank Indonesia, *Statistik Bank Indonesia: Metadata Sekda Desember 2015, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)*, 2015, <https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Contents/Default.aspx>.

pembiayaan sektoral memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB sector masing-masing. Pada dasarnya pembiayaan bank syariah memiliki kaitan erat dengan akses permodalan bagi suatu kegiatan usaha, hal tersebut didasarkan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis, modal atau *budget* dalam bentuk uang menjadi faktor utama yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau bisnis³³. Uang sebagai modal usaha dapat diperoleh melalui pemilik usaha tersebut atau pinjaman dan pembiayaan dari pihak lain seperti kerabat dan lembaga keuangan penyedia modal (Bank Syariah, Koperasi Syariah, BPRS, dll). Pembiayaan melalui bank syariah disalurkan untuk mencukupi kebutuhan modal bagi unit-unit usaha produktif yang dapat digunakan untuk mengadakan aset-aset usaha seperti peralatan, gedung, persediaan, tenaga kerja dan lain sebagainya sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pendapatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

2.1.2.2 Investasi

Berdasarkan penelitian oleh Dewi Maharani (2016) yang dilakukan berdasarkan studi di provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa investasi baik yang berasal dari domestic maupun asing memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menurutnya investasi adalah cara untuk memobilisasi sumber daya dengan melakukan pengeluaran sekarang untuk meningkatkan kapasitas produksi di masa yang akan datang³⁴ sehingga akan melahirkan potensi peningkatan produksi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian tersebut juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Jazuli Rahman (2016) berdasarkan studi di provinsi Banten tahun 2010-2014 yang menjelaskan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB provinsi Banten sehingga diharapkan pemerintah menciptakan iklim investasi yang lebih baik

³³ Solehudin Murpi, Dea Tanyo Iskandar, *Manajemen Bisnis Untuk Orang Awam* (Bekasi: Laskar Aksara, 2011). H. 142.

³⁴ Dewi Maharani, "Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* (2016). H. 33.

lagi³⁵. Kegiatan Investasi memiliki arti yang lebih luas dari modal, berdasarkan teori klasik menjelaskan bahwa investasi merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan saat ini untuk memperoleh suatu hasil keuntungan pada masa yang akan datang³⁶. Dengan investasi diharapkan taraf kehidupan masyarakat dapat lebih baik dan pendapatan daerah dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin, hal ini dikarenakan investasi dapat memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif khususnya dalam kegiatan usaha dan bisnis. Bagi suatu perusahaan, investasi menjadi salah satu faktor penting dalam memperbaiki kualitas perusahaan³⁷. Menurut Ryan Filbert (2015) dan Ella Syafputri (2012) kegiatan investasi dapat dilakukan pada dua sector yaitu pada sector riil dan sector keuangan, investasi pada sector riil adalah investasi yang dialokasikan pada produk yang terlihat secara fisik seperti emas, tanah, properti dan asset riil lainnya³⁸, sedangkan investasi pada sector keuangan menurut Heru Susanto (2012) dan Agus Rijal (2014) dialokasikan dalam bentuk deposito, surat berharga, saham, obligasi dan instrument investasi keuangan lainnya³⁹. Investasi pada sector keuangan biasa dilakukan melalui lembaga mediator seperti perbankan syariah dan pasar modal syariah, melalui perbankan syariah investasi dapat dilakukan dalam bentuk deposito *mudharabah* yaitu dengan menyimpan uang selama jangka waktu tertentu kemudian mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil usaha⁴⁰, sedangkan melalui pasar modal syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembelian surat berharga bukti kepemilikan perusahaan (Emiten) atau yang sering dikenal dengan sebutan saham syariah dengan potensi keuntungan

³⁵ Ahmad Jazuli Rahman, Aris Soelistyo, Syamsul Hadi, "PENGARUH INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI BANTEN TAHUN 2010-2014," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14, no. 1 (2016), <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3890>.

³⁶ Murpi & Iskandar, *Manajemen ...*, h. 142.

³⁷ Mita Kurnia Rizki, Ratno Agriyanto, Dessy Noor Farida, "The Effect of Sustainability Report and Profitability on Company Value: Evidence from Indonesian Sharia Shares," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 117–140.

³⁸ Ryan Filbert, *Bangun Kekayaan, Investasi Properti* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015); Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar & Dirham* (Depok: Penebar Plus+, 2012).

³⁹ Heru Susanto, *Cerdas Memilih Investasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012); Agus Rijal, *Investasi Cerdas Bukan Warisi Utang* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014). H. 91

berupa deviden dan *capital gain* saat menjual surat tersebut⁴¹. Pada dasarnya investasi dalam bentuk deposito maupun saham memiliki tujuan untuk memberikan akses modal kepada unit-unit usaha yang bersangkutan untuk dapat mengembangkan usahanya agar dapat lebih produktif yang nantinya akan berperan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.1.2.3 Akses Lembaga Keuangan Syariah

Ketersediaan akses lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BRPS, KSPS, asuransi syariah dan lain sebagainya menjadi sangat penting bagi perkembangan dunia usaha melihat fungsinya sebagai lembaga yang menyediakan berbagai macam layanan keuangan (*financial*) seperti tabungan, pembiayaan, investasi, transfer, asuransi, permodalan dan lain sebagainya⁴². Berdasarkan segala pelayanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, roda keuangan akan dapat berputar dengan baik hal ini disebabkan karena masyarakat membutuhkan akses investasi, modal, pembiayaan serta jasa keuangan lainnya yang aman untuk itu tersedianya akses lembaga keuangan akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian di suatu daerah.

2.2 Kantor Bank Syariah di Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Definisi Kantor Bank Syariah

Seperti halnya perusahaan jasa lainnya, sebagai badan usaha yang berperan sebagai intermediasi antara pemilik dana (*surplus unit*) dengan pengelola dana (*deficit unit*), bank syariah menyalurkan atau meneruskan layanan syariah kepada masyarakat melalui kantor pelayanan⁴³. Kantor pelayanan berfungsi untuk menjadi tempat atau media dalam memberikan layanan keuangan kepada nasabah, menurut Rizki Aulia Rachman (2013) jumlah kantor bank syariah merupakan variabel indikator pertumbuhan bank syariah karena secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap penyimpanan dan

⁴¹ Rijal, *Investasi Cerdas Bukan Warisi Utang*. H. 229.

⁴² Andri Soemitra, *Bank Syariah & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015). H. 29-30.

⁴³ Dita Meliyana, dan Ade Sofyan Mulazid, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil Dan Jumlah Kantor Terhadap Jumlah Deposito Mudarabah Bank Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017).h. 271

penyaluran dana nasabah. Jumlah kantor bank syariah merupakan gambaran atas luas pangsa pasar dan bank syariah pada suatu daerah yang diharapkan dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan bank syariah. Keberadaan kantor bank syariah juga menggambarkan kemampuan penetrasi bank syariah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan akses keuangan atau bisa diartikan bahwa kantor bank menjadi salah satu variabel inklusi keuangan sepertihalnya pada penelitian Khairul Anwar (2017) yang menjadikan jumlah kantor bank sebagai variabel inklusi keuangan. Pada tahun 2018 terdapat 1.875 kantor Bank Umum Syariah dan 354 kantor Unit Usaha Syariah di Indonesia yang tercatat pada otoritas jasa keuangan (OJK, 2018), jumlah tersebut masih terus berfluktuatif seiring dengan perkembangan kondisi asset bank syariah. Beberapa penelitian diantaranya Dita Meyliana (2017) menjelaskan bahwa secara signifikan jumlah kantor bank syariah berpengaruh terhadap penyaluran dan pelayanan jasa keuangan bank syariah, sehingga dapat disimpulkan jika ekspansi bank syariah melalui penambahan jumlah kantor dapat meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Dalam praktiknya bank syariah mendirikan kantor-kantornya dalam beberapa jenis yaitu kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang penuh/utama, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang memiliki fungsi penyaluran dan pelayanan akses keuangan kepada masyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) nomor 14/SEOJK.93/2016 menyatakan bahwa “*Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kemudahan pembukaan jaringan kantor bagi bank yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Bank dan menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam jumlah tertentu, selain itu bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan, guna mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional*”, berdasarkan surat edaran tersebut dapat dipahami bahwa kantor jaringan bank memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional. Dalam pembukaan jaringan kantor, bank disyaratkan untuk mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi yaitu dengan menghitung ketersediaan alokasi modal inti yang disesuaikan dengan lokasi dan jenis kantor yang akan dibuka, jika bank memiliki kelebihan kapasitas modal inti

maka dapat dialokasikan untuk membuka jaringan kantor dan jika tidak memiliki kelebihan kapasitas modal inti maka belum dapat dialokasikan untuk membuka jaringan kantor. Namun bagi bank yang telah memenuhi syarat kesehatan dan ketersediaan alokasi modal inti berkesempatan memperoleh intensif tambahan jumlah jaringan kantor apabila telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM paling rendah 20 persen (dua puluh persen) dan / atau kepada UMK paling rendah 10 persen (sepuluh persen) dari total portofolio pembiayaan, bahkan persyaratan ketersediaan alokasi modal inti tidak berlaku jika pembukaan kantor fungsional dilakukan dengan tujuan operasional khusus penyaluran kredit kepada UMK⁴⁴, hal tersebut tidak lain ditujukan untuk mendongkrak pembangunan nasional.

2.2.2 Digital Banking (Kantor Layanan Bank Dalam Bentuk Digital)

Pada zaman modern yang sangat kental dengan digitalisasi ini selain menggunakan kantor pelayanan, bank syariah juga menyediakan pelayanan dengan basis teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan. *Automtic teller machine* (ATM) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Anjungan Tunai Mandiri adalah salah satu pelayanan berbasis teknologi informasi yang disediakan bank syariah dan terbukti dapat memberikan kesan yang lebih bagi para nasabah, ATM merupakan mesin yang bertugas sebagaimana seorang teller yang melayani beberapa transaksi nasabahnya baik dalam bentuk penyetoran, penarikan, transfer hingga pelayanan pembayaran lainnya selama nasabah tersebut memiliki kartu ATM, kartu ATM digunakan nasabah untuk mengakses rekening tabungannya melalui mesin ATM dengan menggunakan kode keamanan berupa PIN ATM. Mc Nally dan Abernathy (1989) melaporkan bahwa ada keuntungan utama bagi bank ketika nasabahnya memilih untuk bertransaksi dengan ATM bahwa “*Biaya per-transaksi menggunakan automatic teller machine ATM adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan teller hidup*”,

⁴⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.93/2016 Tentang: Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, 2016, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Pembukaan-Jaringan-Kantor-Bank-Umum-Berdasarkan-Modal-Inti>.

sehingga perusahaan perbankan banyak mendirikan outlet ATM pada wilayah-wilayah strategis hingga pedesaan dibandingkan mendirikan kantor pelayanan baru⁴⁵. Di Indonesia juga dikenal ATM Bersama yang merupakan inovasi baru untuk menghubungkan seluruh jaringan antar bank yang beroperasi di Indonesia sehingga dapat digunakan oleh nasabah dari berbeda bank, ATM Bersama menyediakan fasilitas antar bank termasuk informasi saldo, penarikan tunai hingga transfer antar bank⁴⁶. Selain itu, perkembangan teknologi internet dan *smartphone* memberikan dampak dalam penyediaan layanan bank syariah melalui *digital banking* yang diaplikasikan dalam bentuk mobile banking, internet banking, sms banking dan lain sebagainya. Perkembangan *digital banks* dengan pesatnya dapat menjadi solusi untuk menciptakan mobilitas akses keuangan yang inklusif bagi seluruh masyarakat selama masih terakses dengan *smartphone* dan internet, akan tetapi penggunaan digital banking memerlukan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi dan digital⁴⁷.

2.2.3 Arti Penting Kantor Pelayanan Bank Syariah

Bank sebagai lembaga intermediasi menggunakan kantor sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya diantaranya dalam *funding* dan *lending* yang merupakan akses bagi pelayanan keuangan. Menurut penelitian Rizki Aulia (2013) dan Dita Meyliana (2017) menjelaskan bahwa ketersediaan akses lembaga keuangan syariah dapat digambarkan melalui jumlah kantor lembaga keuangan syariah yang tersedia bagi masyarakat, dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa jumlah kantor bank syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total deposito *mudharabah* bagi bank syariah tersebut. Banyaknya total deposito pada suatu bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank tersebut, hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada penelitian Vidya Fathimah (2017) berdasarkan studi di provinsi Sumatera Utara yang menjelaskan bahwa

⁴⁵ Wendy A Roger, dkk, "Survey of Automatic Teller Machine Usage across the Adult Life Span," *Sage Journal* 38, no. 1 (1996).h. 1-2

⁴⁶ Fitri dan Nur Qamariah, "PEMANFAATAN INTERNET BANKING DAN AUTOMATIC TELLER MACHINE TERKAIT PENINGKATAN USAHA OLEH PELAKU UMKM PASAR INDUK WONOMULYO."h. 471.

⁴⁷ Abdus Salam Dz, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan," *Al Amwal* 10, no. 1 (2018).

jumlah deposito memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah di Sumatera Utara⁴⁸. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan akses lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh terhadap terciptanya akses permodalan dalam menyalurkan pembiayaan sehingga memiliki potensi dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu daerah.

2.3 Pembiayaan Bank Syariah Kepada UMKM dan Non UMKM di Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan salah kegiatan bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah⁴⁹ yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan baik secara daerah maupun nasional serta meningkatkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan sosial⁵⁰. Kegiatan pembiayaan menjadi salah satu kegiatan penting bagi bank syariah sebagaimana lembaga perantara (*intermediate*) yang juga berorientasikan pada bisnis / profit untuk mencari keuntungan dengan cara menyalurkan dana nasabah yang dihimpunnya melalui tabungan, giro dan deposito dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan jual beli dan kerja sama usaha. Dalam prakteknya, pembiayaan dilakukan dengan cara menginvestasikan dana pihak ketiga (DPK) kepada sector bisnis maupun non bisnis (pengelola dana) dalam bentuk modal usaha / kerja, jual beli maupun investasi, bank syariah mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil atas laba yang didapatkan oleh sector bisnis atau keuntungan margin harga atas jual beli barang dan jasa.

Dasar hukum kegiatan pembiayaan bank syariah telah diatur pada berbagaimacam peraturan mulai dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah hingga pada Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

⁴⁸ Vidya Fathimah, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Di Sumatera Utara," *Jurnal Ilman* 5, no. 1 (2017).

⁴⁹ Ismai, *Perbankan ...*, h. 106.

⁵⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).h. 24.

Nasiona (DSN) yangmana merupakan badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang dipercaya untuk memiliki kompetensi dan otoritas yang diakui secara resmi. Dalam Al-Quran dan Hadits juga telah termaktub adanya anjuran dan perintah dalam melakukan kegiatan pembiayaan.

Surat ni-Nisa’/4 ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hadits riwayat Ibnu Majah dan Shuhaib:

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن ثابت البزار حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁵¹

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharbah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dan shuhaib)

Pada surat an-Nisa’/4: 29 dijelaskan bahwa pemanfaatan harta baik untuk konsumsi ataupun bisnis tidaklah diperbolehkan menggunakan cara yang batil (*bil batil*), menurut Aisyah binti Syati’ dalam tafsirnya disebutkan bahwa kata *bil batil* memiliki makna yaitu kegiatan yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar syariat seperti halnya kegiatan pencurian, penipuan, memakan riba dan kegiatan-kegiatan lain yang dilarang agama dan berdampak negative bagi

⁵¹ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazuni, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, n.d.).h. 246.

masyarakat⁵², sedangkan yang diperbolehkan adalah bisnis (*tijarah*) yang didasarkan atas rasa suka sama suka sebagaimana yang dijelaskan pada hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Shuhaib yang menjelaskan tentang tiga perkara yang mengandung berkah adalah *al-bai' ila ajal* atau jual beli non tunai, menurut syeikh Muhammad Salim menjelaskan makna *al-bai' ila ajal* yang diberkahi adalah jual beli non tunai yang harga barangnya tidak berubah sejak awal perjanjian / akad meskipun dalam kurun waktu yang lama, kemudian dijelaskan tentang makna dari *muqaradhadh* yaitu yang banyak dipraktikkan oleh bangsa Arab dengan konsep *syirkah mudharabah* atau yang biasa dikenal dengan sebutan kerjasama usaha *mudharabah*⁵³. Dalam kedua dalil tersebut dimaksudkan bahwa kegiatan bisnis (*tijarah*) yang dalam prakteknya dapat dilakukan dengan cara jual-beli (*al-bai'*) ataupun kerjasama usaha (*mudharabah*) merupakan kegiatan menguntungkan yang diberkahi oleh Allah SWT.

2.3.2 Arti Penting Pembiayaan Bank Syariah

Beberapa penelitian seperti milik Nurul Hidayah (2017) dan Nurhajati (2013) membuktikan bahwa secara signifikan pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh terhadap tingkat pendapatan bank syariah⁵⁴. Selain itu berdasarkan penelitian L. Anggreani (2013) menjelaskan bahwa pembiayaan oleh perbankan syariah dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan industry baik industry kecil hingga manufaktur⁵⁵, maka dapat diartikan bahwa selain memiliki kontribusi terhadap pendapatan bank syariah, pembiayaan bank syariah juga memiliki peran dalam keberlangsungan dan

⁵² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Quran Tematik, Jilid 2* (Bandung: Kamil Pustaka, 2018).h. 144-145.

⁵³ Uthiah Muhammad Salim, "Uthiah Muhammad Salim, Kitab Al-Buyu': Bab-Alqirodh," *Islamweb.Net*, accessed April 29, 2020, <https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=135048>.

⁵⁴ Nurul Hidayah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016," *Jurnal Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2017); Nurhajati dan Dudung Abdurrahman, "Kajian Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah: Studi Kasus Bank BNI Syariah," *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 1 (2013).

⁵⁵ Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari, dkk, "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor," *Jurnal al-Muzara'ah* 1, no. 1 (2013).

perkembangan industry yang merupakan unit ekonomi penting bagi masyarakat. Menurut Purwanto (2017) dan Zaini Ibrahim (2015) berdasarkan penelitiannya tentang kontribusi bank syariah di pulau Jawa – Sumatra dan provinsi Banten secara khusus menjelaskan adanya kontribusi yang signifikan yaitu selama 2012 sampai dengan 2016 pembiayaan bank syariah berkontribusi sebesar 50,11 persen terhadap pertumbuhan PDRB pulau Jawa dan Sumatra lalu selama tahun 2009 sampai dengan 2013 pembiayaan bank syariah memiliki kontribusi sebesar 53 persen terhadap pertumbuhan PDRB provinsi Banten, sehingga sangat dapat dirasa kontribusi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki peranan cukup tinggi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa selain kontribusinya pada tingkat pendapatan (*profitabilitas*) bank syariah, pembiayaan yang telah disalurkan bank syariah juga telah berkontribusi dalam pembangunan beberapa daerah di Indonesia.

2.3.3 Parktek Pembiayaan Bank Syariah

Pada praktetnya pembiayaan bank syariah dilakukan dengan menggunakan berbagaimacam akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari pembiayaan jual beli yang menggunakan akad *murabahah*, *isthina*, *salam* hingga akad pembiayaan usaha menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, selain itu bank syariah juga menerapkan konsep multi akad (*hybrid contract/al-‘uqud al-murakkabah*) yang merupakan modifikasi akad kontemporer dimana para subjek akad berjanji melakukan dua akad dalam satu produk bank syariah⁵⁶ Akad-akad pembiayaan tersebut disesuaikan dengan produk yang menjadi kebutuhan nasabah seperti produk tabungan menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*, pembiayaan konsumtif atau pengadaan barang menggunakan akad *murabahah*, pembiayaan bisnis menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dan lain sebagainya. Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu pembiayaan konsumen, ritel dan *wholesale*:

⁵⁶ Ali Murtadho, *Model Aplikasi Fiqh Muammalah Modern* (Semarang: Pustaka Zaman, 2015).h. 38.

1. Pembiayaan consumer atau merupakan pembiayaan yang disalurkan untuk pembelian asset atau barang yang bersifat konsumtif seperti rumah, apartemen, mobil, laptop dan lain sebagainya⁵⁷. Berikut beberapa produk pembiayaan consumer yang dimiliki bank syariah:
 - a. Griya Faedah BRI Syariah, sebuah produk pembiayaan perorangan dengan menggunakan akad *murabahah* atau *ijarah* dalam pembelian/sewa rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kapling, pembangunan, renovasi dan lain-lain⁵⁸.
 - b. BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB), sebuah produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik lama ataupun baru dengan menggunakan akad *murabahah*⁵⁹.
 - c. Pembiayaan IB Muamalat Multiguna, sebuah produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah dengan menggunakan akad *murabahah* atau *ijarah* multijasa⁶⁰.
2. Pembiayaan ritel atau merupakan penyaluran dana kepada perorangan ataupun badan usaha dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha atau produktif⁶¹. Berikut beberapa produk pembiayaan ritel yang dimiliki bank syariah:
 - a. Ritel Faedah BRI Syariah yang terdiri dari pembiayaan modal kerja syariah menggunakan sistem bagi hasil pada akad *mudharabah*, *musyarakah* dan pembiayaan investasi syariah untuk pembelian asset modal menggunakan akad *murabahah*, *ijarah* atau *ijarah muntahiyya*

⁵⁷ Ikatan Bangkir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.).h. 50.

⁵⁸ BRI Syariah, "KPR Sejahtera BRISyariah IB," *Www.Brisyariah.Co.Id*, accessed May 1, 2020, <https://www.brisyariah.co.id/detail/Produk.php?f=12>.

⁵⁹ Mandiri Syariah, "Pembiayaan Kendaraan Bermotor," *Www.Mandirisyariah.Co.Id*.

⁶⁰ Bank Muamalat, "Pembiayaan IB Muamalat Multiguna," *Www.Bankmuamalat.Co.Id*, accessed May 1, 2020, <https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/pembiayaan-ib-muamalat-multiguna>.

⁶¹ Ikatan Bangkir Indonesia, *Mengelola Bisnis ...*, h. 51.

- bittamlik*, dan/atau akad lain yang bersesuaian dengan kebutuhan dan skema pembiayaan⁶².
- b. BSM Pembiayaan Usaha Mikro yang merupakan pembiayaan kepada wiraswasta atau pedagang untuk kegiatan usaha dengan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja⁶³.
 - c. Pembiayaan Investasi BTN iB yang merupakan pembiayaan untuk pembelian asset/barang investasi dengan menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, atau *isthisna*⁶⁴.
3. Pembiayaan *wholesale*, berdasarkan jenis produknya pembiayaan *wholesale* memiliki kesamaan dengan pembiayaan ritel. Perbedaannya terdapat pada *loan size* yang lebih besar dibandingkan pembiayaan ritel dengan kriteria sebagai berikut⁶⁵:

Tabel 2.1: Perbedaan Antara Pembiayaan Ritel dan Pembiayaan *Wholesale*

No	Keterangan	Pembiayaan Ritel	Pembiayaan <i>Wholesale</i>
1.	Kepemilikan Usaha	Perorangan/Badan Usaha	Badan Usaha
2.	Kompleksitas Usaha	Rendah	Tinggi
3.	Diversifikasi Usaha	Tidak banyak, dan beberapa bahkan focus pada satu bidang usaha	Beberapa memiliki banyak bidang usaha melalui anak perusahaannya

⁶² BRI Syariah, "Pembiayaan Komersial," *Www.Brisyariah.Co.Id*, accessed May 1, 2020, <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?f=42>.

⁶³ Mandiri Syariah, "Pembiayaan Usaha Mikro," *Www.Mandirisyariah.Co.Id*, accessed May 1, 2020, <https://www.mandirisyariah.co.id/business-banking/micro-banking/pembiayaan-usaha-mikro>.

⁶⁴ BTN Syariah, "Pembiayaan Investasi BTN IB," *Www.Btn.Co.Id*, accessed May 1, 2020, <https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home/Syariah-Data-Sources/Product-Links-Syariah/Produk-BTN-Syariah/kredit-komersial/ Pembiayaan-Usaha/Pembiayaan-Investasi-BTN-iB>.

⁶⁵ Ikatan Bangkir Indonesia, *Mengelola Bisnis ...*, h. 66-67

4.	Validitas Dokumen & Laporan Keuangan	Relatif rendah	Tinggi
5.	Pola Jaminan Pinjaman	<i>Asset based</i>	<i>Asset based & clean basis</i>
6.	Proses Kredit	Relatif mudah	Lebih sulit dibandingkan dengan ritel
7.	Tingkat Risiko Pengelolaan Usaha	Tinggi, apalagi jika debiturnya merupakan usaha perorangan yang asset usahanya masih menjadi satu dengan urusan rumah tangga	Moderat karena sudah terstruktur dan dikelola secara profesional

2.3.3 Pembiayaan UMKM dan Non UMKM

Pembiayaan UMKM tergolong pembiayaan ritel yang disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk keperluan pengembangan usahanya. Sedangkan pembiayaan non UMKM terbagi menjadi dua sector yaitu sector bisnis/usaha skala besar dengan golongan pembiayaan *wholesale* dan sector pembiayaan konsumsi yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pribadinya seperti pembiayaan untuk rumah dan mobil pribadi. Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah), usaha kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan bukan merupakan bagian dari perusahaan besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), usaha menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan bukan bagian dari perusahaan besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak (Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), usaha yang tidak termasuk kriteria diatas adalah tergolong perusahaan besar atau non UMKM.

Semenjak tahun 2014 hingga tahun 2019 pembiayaan UMKM dan non UMKM mengalami peningkatan meskipun berfluktuatif, peningkatan fluktuatif tersebut dipengaruhi oleh berbagaimacam faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan salah satu faktor yang secara signifikan positif mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan⁶⁶. Dana pihak ketiga merupakan jumlah dana yang disimpan oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana di bank syariah melalui akad wadiah yad dhamanah dan akad mudharabah muthlaqoh, dana tersebutlah yang nantinya akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan dari bank syariah. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa jika jumlah dana pihak ketiga (DPK) rendah maka jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan juga akan ikut rendah dan sebaliknya jika jumlah dana pihak ketiga (DPK) tinggi maka pembiayaan yang disalurkan akan ikut tinggi. Menurut para praktisi rasio penyaluran pembiayaan atas dana pihak ketiga

⁶⁶ Leli Putri Ansari, "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembayaran Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia : Studi . Kasus Bank Syariah Bukopin," *Jurnal Ekombis* 3, no. 1 (2017).

(DPK) atau yang dikenal dengan sebutan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ideal adalah berkisar 85 persen hingga 100 persen⁶⁷ namun Bank Indonesia berdasarkan SEBI No. 6/23/CPNP Tahun 2004 menjelaskan bahwa rentan rasio yang baik adalah dari 75 persen hingga 100 persen⁶⁸, semakin kecil rasio akan semakin baik kesehatan bank.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah kantor bank syariah dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB). Hasil dari beberapa penelitian tersebut akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Khairul Anwar (2017), menganalisa tentang pengaruh inklusi keuangan yang digambarkan dengan variabel jumlah ATM, jumlah rekening kredit dan jumlah kantor bank terhadap produk domestik bruto. Penelitian ini ditujukan untuk menilai kualitas inklusi keuangan di Indonesia dengan berkaca kepada negara-negara yang memiliki PDB tinggi disertai akses layanan keuangan yang inklusif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa jumlah kantor bank, jumlah rekening kredit dan jumlah ATM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB).

Safaah Restuning (2014), menganalisa tentang peran serta perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel total asset perbankan syariah dan total pembiayaan perbankan syariah untuk menggambarkan peran perbankan syariah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui variabel produk domestik bruto (PDB). Hasilnya total asset perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB sedangkan total pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB dengan nilai R square 0,338

⁶⁷ Suryani, "Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Rasio Keuangan pada BUS dan UUS Periode 2008-2010", dalam *E CONOMICA*: Vol. 22, Edisi. 2, November 2012, h. 158.

⁶⁸ Bank Indonesia, "Lampiran 2e Surat Edaran Bank Indonesia: SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004", https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/pages/ketentuan_persen20perbankan.aspx, diakses pada Selasa 4 Mei 2020.

yang menggambarkan bahwa kedua variabel independen memiliki pengaruh sebesar 33,8 persen terhadap PDB.

Zaini Ibrahim (2015), menganalisa tentang kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan variabel dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan bank syariah sebagai indikator kontribusi bank syariah dalam menguji pengaruhnya terhadap perekonomian provinsi Banten yang digambarkan dengan produk domestic regional bruto (PDRB). Hasilnya berdasarkan uji parsial variabel DPK dan pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDRB Banten, akan tetapi berdasarkan uji simulatan DPK dan pembiayaan berpengaruh terhadap PDRB Banten.

Joko Susilo (2015), menganalisa tentang pengaruh pembiayaan bank syariah dan tenaga kerja terhadap peningkatan produk domestic bruto (PDB) sektoral pada tahun 2006-2013. Penelitian ini menggunakan faktor tenaga kerja dan pembiayaan bank syariah sebagai variabel independen untuk menganalisa pengaruhnya terhadap produk domestic bruto (PDB) yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. Hasilnya berdasarkan uji simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PDB, pada uji parsial variabel pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB, sedangkan variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap PDB, menurut R square menunjukkan angka 0,989,255 atau 98,9 persen yang artinya kedua variabel independen dapat memberi pengaruh sebesar 98,9 persen kepada variabel dependen.

Rizfa Faiza (2016), menganalisa tentang pengaruh alokasi pembiayaan sector-sector ekonomi oleh perbankan syariah terhadap produk domestic regional bruto (PDRB) provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2010-2015. Penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan sektoral yang dikelompokkan dalam sector AGRIFISH, sector MINING, sector INDUST dan sector CONTS yang akan dianalisa pengaruhnya terhadap PDRB pada sector AGRIFISH, sector MINING, sector INDUST dan sector CONTS. Hasilnya tidak seluruh pembiayaan sektoral memberikan pengaruh positif dan signifikan

terhadap PDRB secara umum, pembiayaan sector pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Kemudian secara sector per sector seluruhnya memberikan pengaruh yang positif dan signifikan kecuali pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan yang berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Atika (2017)⁶⁹, menganalisa tentang pengaruh pembiayaan dan tingkat bagi hasil terhadap tingkat kesejahteraan di Indonesia dilihat dari pertumbuhan PDB. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pada saat menghadapi krisis bank syariah juga mampu memberikan kesejahteraan dalam jangka panjang melalui penyaluran pembiayaan. Faktor-faktor yang diteliti adalah faktor pembiayaan bank syariah, bagi hasil pembiayaan bank syariah dan produk domestik bruto (PDB). Hasilnya berdasarkan uji parsial faktor pembiayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDB sedangkan bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan, namun secara simultan kedua variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Menurut R square menunjukkan bahwa kedua variabel bebas memiliki peran sebesar 66,6 persen dalam mempengaruhi variabel terikat.

Sinta Rani (2016), menganalisa tentang pengaruh penyaluran dana bank konvensional dan bank syariah terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh yang diberikan oleh perbankan baik syariah maupun konvensional melalui penyaluran pembiayaannya terhadap tingkat produk domestik bruto (PDB). Hasilnya secara parsial pembiayaan bank syariah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat PDB sedangkan pembiayaan bank konvensional memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB, pada uji simultan kedua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, lalu pada uji R square menunjukkan angka 0,99256 atau 99,26 persen yang artinya variabel bebas memiliki peranan sebesar 99,26 persen terhadap variabel terikat.

⁶⁹ Atika, "Pengaruh Pembiayaan Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia Dilihat Dari Pertumbuhan PDB," *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2017).

Rizki Aulia (2013), menganalisa tentang pengaruh bagi hasil, bunga, ukuran bank dan jumlah cabang terhadap banyaknya simpanan mudharabah pada bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinasi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan mudharabah pada bank syariah, faktor-faktor yang akan diuji terdiri dari faktor tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, ukuran bank dan jumlah kantor cabangnya. Hasilnya menurut uji simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, berdasarkan uji parsial tingkat bagi hasil dan jumlah kantor berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah, tingkat suku bunga berpengaruh negative dan ukuran bank tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan mudharabah pada bank syariah.

Dita Meyliana (2017), menganalisa tentang pengaruh produk domestic bruto (PDB), jumlah bagi hasil dan jumlah kantor terhadap jumlah deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia, faktor-faktor tersebut terdiri dari produk domestic bruto, jumlah bagi hasil dan jumlah kantor. Hasilnya berdasarkan uji parsial faktor PDB, jumlah bagi hasil dan jumlah kantor memiliki pengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah.

Haqiqi Rafsanjani (2014)⁷⁰, menganalisis tentang peran serta bank konvensional dan syariah terhadap perekonomian di Indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh total simpanan bank konvensional dan bank syariah, total kredit bank konvensional dan total pembiayaan bank syariah, total asset bank konvensional dan bank syariah terhadap GDP *Gross Domestic Bruto* negara Indonesia. Hasilnya TK, TP dan TAS signifikan berpengaruh terhadap GDP, sedangkan TS, TA dan TSS tidak signifikan berpengaruh terhadap GDP.

Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel
----	---------	-------	----------

⁷⁰ Haqiqi dan Raditya Sukmana Rafsanjani, "Pengaruh Perbankan Atas Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)* 12, no. 3 (2014).

1	Khairul Anwar, Amri (2017)	Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap PDB Indonesia	Jumlah ATM, Jumlah Rekening Kredit, Jumlah Kantor Bank dan Produk Domestik Bruto
2	Safaah Restuning Hayati (2014)	Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Total asset perbankan syariah, total pembiayaan perbankan syariah dan produk domestic bruto (PDB)
3	Zaini Ibrahim (2015)	Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Banten	Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bank Syariah, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten
4	Joko Susilo, Nirdukita Ratnawati (2015)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB): Analisis Sektoral Tahun 2006-2013	Pembiayaan Bank Syariah, Tenaga Kerja, Produk Domestik Bruto
5	Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza (2016)	Pengaruh Alokasi Pembiayaan Sektor- Sektor Ekonomi Oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur (Periode	Pembiayaan sector AGRIFISH, sector MINING, sector INDUST dan sector CONTS, PDRB sector AGRIFISH, sector MINING, sector

		Triwulanan Tahun 2010-2015)	INDUST dan sector CONTS
6	Atika (2017)	Pengaruh Pembiayaan dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Indonesia dilihat dari Pertumbuhan PDB	Tingkat Bagi Hasil, Pembiayaan Bank Syariah, Produk Domestik Bruto
7	Sinta Rani Siti Sarah, Sumiyarti (2016)	Pengaruh Penyaluran Dana Bank Konvensional dan Bank Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia	Penyaluran Dana Bank Konvensional, Pembiayaan Bank Syariah, PDB
8	Rizki Aulia Rachman, Agung Yulianto, Nanik Sri Utaminingsih (2013)	Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan <i>Mudharabah</i>	Pengaruh Bagi Hasil, Tingkat Bunga, Jumlah Cabang, Simpanan <i>Mudharabah</i>
9	Dita Meyliana, Ade Sofyan Mulazid (2017)	Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito <i>Mudharabah</i> Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015	Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor, Jumlah Deposito <i>Mudharabah</i>
10	Haqiqi Rafsanjani, Raditya Sukmana (2014)	Pengaruh Perbankan Atas Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Bank Konvensional dan	<i>Gross Domestik Bruto</i> (GDP), Total Simpanan, Total

		Bank Syariah di Indonesia	Kredit/Pembiayaan dan Total Aset
--	--	------------------------------	-------------------------------------

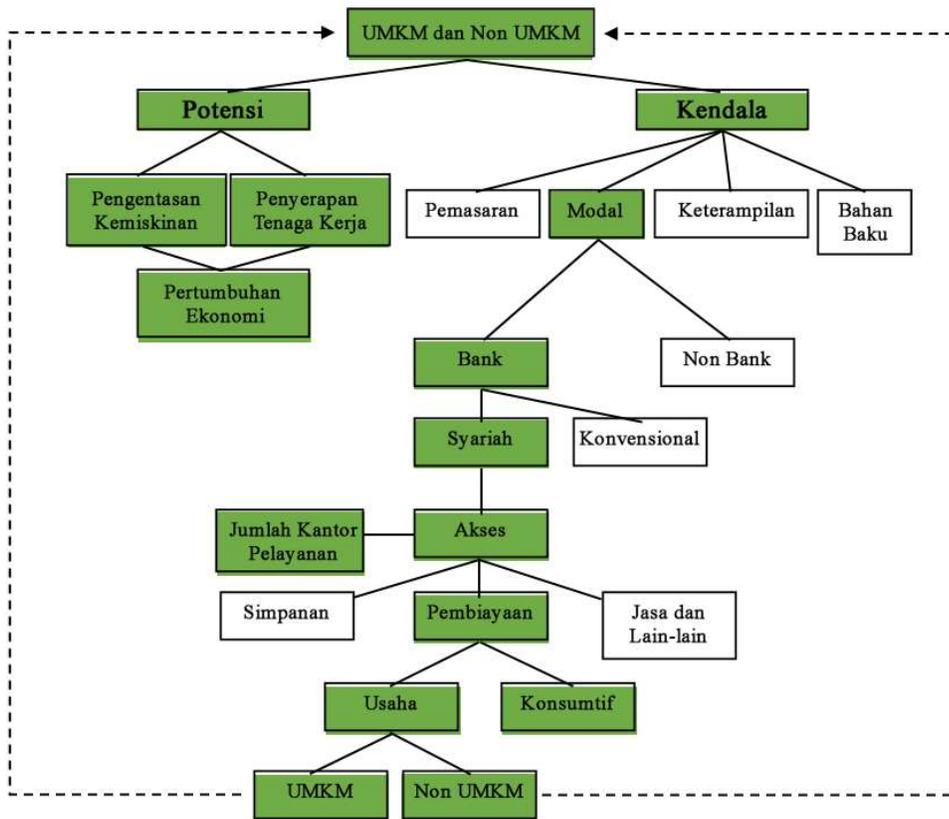
Sumber: Khairul Anwar (2017), Safaah Restuning (2014), Zaini Ibrahim (2015), Joko Susilo (2015), Rizfa Faiza (2016), Atika (2017), Sinta Rani (2016), Rizki Aulia (2013), Dita Meyliana (2017), Haqiqi Rafsanjani (2014)

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan. Kesamaan penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah analisis peran serta bank syariah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Hal yang spesifik pada penelitian ini adalah obyeknya yaitu seluruh Bank Syariah (BUS dan UUS) secara kumulatif yang berada di provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun (2014 – 2019) tentang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Variabel dependen yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 provinsi Jawa Tengah tahun, dan variabel independen yaitu jumlah kantor bank syariah yang mana merupakan wujud riil dari ketersediaan akses keuangan syariah, jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM dan pembiayaan yang disalurkan kepada non UMKM dalam bentuk pembiayaan modal kerja hingga konsumsi yang merupakan mesin dalam mencukupi kebutuhan perekonomian di suatu daerah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini memisahkan antara alokasi pembiayaan bank syariah yaitu pada sector UMKM dan sector non UMKM mengingat keduanya memiliki perbedaan baik secara permodalan, valuasi, resiko, operasional, hingga pada manajemen organisasinya.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritik

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran

Gambar 2.5.1 Model Konseptual



sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi alternative solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas timbulah model konseptual yang dijelaskan pada gambar 2.5.1, sehingga timbulah kerangka pemikiran teoritik yang akan dijelaskan pada gambar 2.5.2.

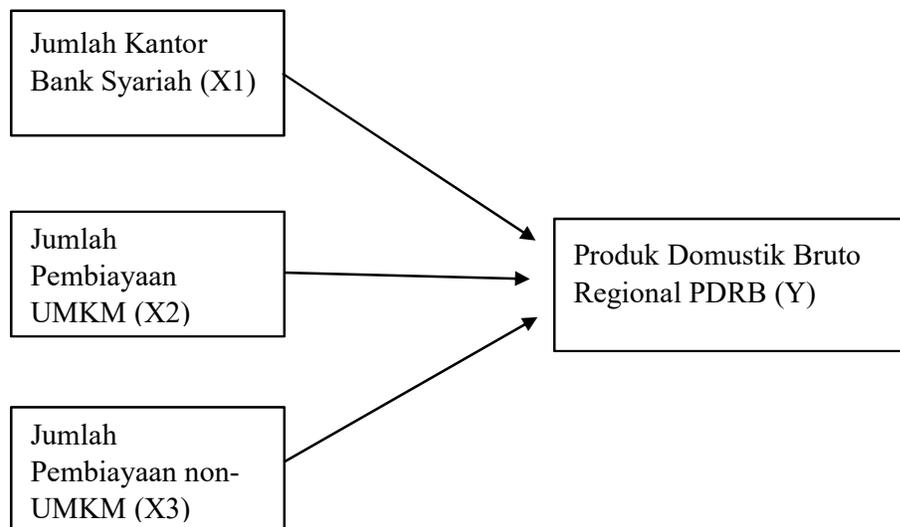
Skema diatas menggambarkan bagaimana siklus perjalanan ekonomi secara mikro berlangsung di suatu daerah, dari skema diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran bank syariah adalah sebagai solusi atas kendala akses permodalan dalam bentuk pembiayaan untuk usaha baik

UMKM maupun non UMKM untuk berproduksi dan mencukupi permintaan dan kebutuhan konsumen konsumen. Dampak dari berlangsungnya produksi oleh UMKM dan non UMKM dapat menjadi upaya pengantasan

angka kemiskinan dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga berpotensi tercapainya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pada penelitian ini terbentuklah suatu kerangka pemikiran teoritik yang diambil dari beberapa faktor yang dilalui oleh siklus ekonomi mikro di atas untuk menguji apakah bank syariah sudah melakukan perannya sebagai solusi kendala akses keuangan untuk unit usaha mikro, kecil dan menengah maupun non UMKM sebagai berikut :

Gambar 2.5.2: Kerangka Pemikiran Teoritik



Sumber: dikembangkan dari penelitian Khairul Anwar (2017), Safaah Restuning (2014), Zaini Ibrahim (2015), Joko Susilo (2015), Rizfa Faiza (2016), Atika (2017), Sinta Rani (2016), Rizki Aulia (2013), Dita Meyliana (2017), Haqiqi Rafsanjani (2014)

Keterangan :

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, variable independen dalam penelitian ini adalah jumlah kantor bank syariah, jumlah pembiayaan UMKM dan jumlah pembiayaan non UMKM. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah produk domestic bruto regional.

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis memiliki kemungkinan untuk benar dan salah. Berdasarkan rumusan serta kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

2.6.1 Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah terhadap PDRB

Provinsi Jawa Tengah

Hipotesis pertama (H1): “Jumlah kantor bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestic bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah”. Hipotesis tersebut didasarkan pada hasil penelitian Khairul Anwar (2017) yang menyatakan bahwa jumlah kantor bank memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia, selain itu pada penelitian Rizki Aulia (2013) juga menyatakan bahwa jumlah kantor cabang bank memiliki pengaruh positif terhadap simpanan mudharabah begitu juga pada penelitian Dita Meyliana (2017) menyatakan bahwa jumlah kantor bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.

Jumlah kantor bank syariah dapat menggambarkan aksesibilitas bank syariah yang menjadi indikator dalam mewujudkan keuangan yang inklusif. Keuangan yang inklusif dapat memberikan akses layanan keuangan dalam bentuk simpanan maupun permodalan yang berpotensi mendorong produktifitas masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis skala kecil maupun skala besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

2.6.2 Pengaruh Pembiayaan UMKM terhadap PDRB Provinsi Jawa

Tengah

Hipotesis kedua (H2): “Jumlah pembiayaan UMKM oleh bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestic bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah”. Hipotesis tersebut didasarkan pada hasil penelitian Safaah Restuning (2014), Joko Susilo (2015), Atika (2017), Sinta Rani (2016) dan Haqiqi Rafsanjani (2014)

yang menyatakan bahwa dalam skala nasional pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digambarkan dalam bentuk PDB. Kemudian pada hasil penelitian Rizka Faiza (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan bank syariah yang disalurkan pada sector-sektor AGRIFISH, MINING, INDUST dan CONTS terhadap PDRB pada sector AGRIFISH, MINING, INDUST dan CONTS yang mana Kemudian secara sector per sector seluruhnya memberikan pengaruh yang positif dan signifikan kecuali pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan yang berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Jumlah pembiayaan UMKM bank syariah dapat menggambarkan kemanfaatan (*usage*) bank syariah yang menjadi indikator dalam mewujudkan keuangan yang inklusif. Keuangan yang inklusif dapat memberikan akses layanan keuangan dalam bentuk simpanan maupun permodalan bagi para pelaku UMKM yang berpotensi mendorong perkembangan dan produktifitas bisnisnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

2.6.3 Pengaruh Pembiayaan Non UMKM terhadap PDRB Provinsi

Jawa Tengah

Hipotesis ketiga (H3): “Jumlah pembiayaan non UMKM oleh bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestik bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah”. Hipotesis tersebut didasarkan pada hasil penelitian Safaah Restuning (2014), Joko Susilo (2015), Atika (2017), Sinta Rani (2016) dan Haqiqi Rafsanjani (2014) yang menyatakan bahwa dalam skala nasional pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digambarkan dalam bentuk PDB. Kemudian pada hasil penelitian Rizka Faiza (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan bank syariah yang disalurkan pada sector-sektor AGRIFISH, MINING, INDUST dan CONTS terhadap PDRB pada sector AGRIFISH, MINING, INDUST dan CONTS yang mana Kemudian secara sector per sector seluruhnya memberikan pengaruh yang positif dan signifikan kecuali

pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan yang berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Jumlah pembiayaan non UMKM bank syariah dapat menggambarkan kemanfaatan (*usage*) bank syariah yang menjadi indicator dalam mewujudkan keuangan yang inklusif. Keuangan yang inklusif dapat memberikan akses layanan keuangan dalam bentuk simpanan maupun permodalan bagi para pelaku besar yang berpotensi mendorong perkembangan dan produktifitas bisnisnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kausal komparatif yaitu salah satu metode penelitian kuantitatif *ex post-facto* yang dilakukan dengan cara melihat hubungan sebab akibat antara suatu ubahan dengan ubahan yang lain⁷¹ berdasarkan data-data yang ada. Penelitian menggunakan metode ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya suatu keputusan atau tindakan manusia memiliki hubungan sebab akibat (pengaruh) terhadap kondisi objek penelitian. Penelitian kausal komparatif dapat menentukan penyebab, efek, atau konsekuensi yang ada di antara beberapa ubahan⁷², sehingga sangat tepat untuk digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisa pengaruh akses dan pembiayaan terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadikannya evaluasi dan pertimbangan pada penentuan tindakan dan kebijakan.

Dalam hal ini yang akan menjadi objek penelitian adalah bagaimana aktivitas bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mengisi perannya sebagai solusi atas kendala akses permodalan bagi para pengusaha-pengusaha baik usaha mikro, kecil, menengah maupun usaha non mikro, kecil, menengah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Penggunaan metode kasual komparatif pada penelitian kuantitatif memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah kondisi variabel bebas (*independen*) yang tidak dapat dikontrol karena peristiwa tersebut telah terjadi sehingga menjadi sangat terbatas dalam penentuan sampel, terkadang suatu gejala tidak hanya disebabkan oleh sebab yang sama, dalam suatu gejala tertentu dapat disebabkan oleh sebab lain atau situasi yang lain⁷³. Untuk itu

⁷¹ Mari Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2017).h. 64.

⁷² *Ibid*, h. 67.

⁷³ *Ibid*, h. 69.

diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam menentukan variabel-variabel bebas (*independen*) yang akan digunakan dalam penelitian.

3.2 Sumber Data

Data⁷⁴ yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data statistic asset bank syariah yaitu jumlah kantor bank syariah baik kantor pusat, cabang, cabang pembantu hingga kantor kas, data jumlah penyaluran pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan non usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) serta data produk domestic bruto regional provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 dalam kurun waktu triwulan yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dengan alamat www.ojk.go.id dan www.bps.jateng.go.id. Data dokumentasi adalah data yang memuat informasi mengenai suatu objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disusun dalam suatu laporan berupa teks, tabel, grafik dan lain-lain, sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada organisasi, perusahaan atau badan hukum lainnya dan dari sumber lain yang mengadakan studi pada objek tersebut. Data tersebut disajikan dalam bentuk berkala (*time series*) per triwulan yang diambil selama enam tahun mulai tahun 2014 sampai dengan 2019.

3.3 Populasi

Menurut Soehardi Sigit (1999) populasi adalah kelompok yang akan dikenankan atau ditetapkan dalam penelitian⁷⁵. Dalam hal ini peneliti diharuskan untuk menentukan populasi berdasarkan cangkupan penelitian, penentuan populasi bisa dilakukan dengan berdasarkan area, wilayah, jenis, sifat, tingkatan (*rating*), kondisi dan lain-lain. Populasi yang dipilih untuk

⁷⁴ Menurut *Webster's New Wordl Dictionary*, data berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap, sehingga dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang berguna untuk menjadi dasar dalam membuat keputusan (*decision makers*). Lihat: J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikas Edisi Ketujuh, Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008, h. 2.

⁷⁵ Danang Suyonto, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Alat Statistik & Analisis Output Komputer* (Sleman: CAPS, 2011). H. 17.

penelitian ini didasarkan pada jenis dan wilayah objek penelitian yaitu lembaga keuangan perbankan syariah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diambil dari seluruh elemen populasi yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengutip data sekunder yang telah disajikan oleh lembaga pengolah data resmi yaitu otoritas jasa keuangan (OJK) melalui website resminya di www.ojk.go.id dan badan pusat statistic (BPS) melalui website resminya www.bps.jateng.go.id. Berdasarkan pengertiannya, dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang peristiwa yang sudah berlalu, artinya peneliti mengutip data tentang tingkat produk domestic bruto regional provinsi Jawa Tengah, jumlah asset berupa kantor bank syariah di provinsi Jawa Tengah, dan jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada UMKM dan non UMKM di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2018.

3.5 Variabel Penelitian

Berdasarkan klasifikasi posisi dan fungsinya dalam penelitian kuantitatif variabel memiliki bermacam jenis diantaranya adalah variabel bebas, terikat, antara, control, pengganggu dan lain-lain⁷⁶. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode kausal comperatif ini, peneliti menggunakan dua jenis varibel saja yaitu variabel bebas dan terikat.

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, menjelaskan, atau menerangkan variabel lain⁷⁷. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel bebas adalah :

- a. Jumlah kantor bank syariah (X1) merupakan jumlah (kuantitas) kantor bank syariah baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah yang terletak di provinsi Jawa Tengah
- b. Jumlah pembiayaan bank syariah UMKM (X2) merupakan jumlah pembiayaan syariah yang disalurkan kepada sector usaha mikro kecil

⁷⁶ Mari Yusuf, *Metode Penelitian ...*, h. 108.

⁷⁷ *Ibid*, h. 109.

dan menengah untuk keperluan pengembangan usaha atau bisnis yang terletak di Provinsi Jawa Tengah.

- c. Jumlah pembiayaan bank syariah non UMKM (X3) merupakan jumlah pembiayaan syariah yang disalurkan kepada sector usaha berskala besar yang bukan termasuk UMKM berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dan pembiayaan syariah yang disalurkan untuk keperluan konsumsi di provinsi Jawa Tengah.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain akan tetapi tidak dapat mempengaruhi variabel yang lain⁷⁸. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel terikat adalah jumlah produk domestic bruto regional (PDRB) provinsi Jawa Tengah yang merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada pada suatu daerah tertentu, atau dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas seluruh unit ekonomi di provinsi Jawa Tengah.

3.6 Teknis Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan rumus-rumus statistic untuk menghasilkan jawaban secara kuantitatif dari pertanyaan “apakah bank syariah telah melakukan perannya sebagai solusi akses modal bagi pengusaha UMKM maupun non UMKM di provinsi Jawa Tengah”. Adapaun langkah-langkah pengujian hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji distribusi seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang baik untuk digunakan dalam penelitian adalah data yang berdistribusi normal

⁷⁸ *Ibid*, h. 109.

yaitu yang dapat dilihat dari nilai kemiringan yang mendekati angka 0 sehingga memiliki kecenderungan yang seimbang⁷⁹.

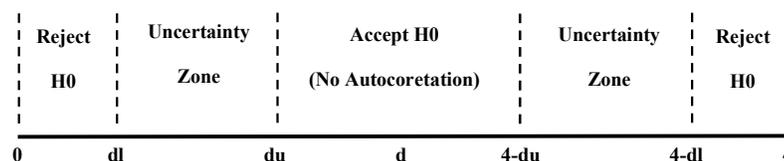
Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Pengambilan keputusan distribusi data normal menggunakan uji Kolmogorov smirnov didasarkan pada nilai signifikansi yang lebih dari 5% atau $> 0,05$, maka jika nilai signifikansi kurang dari 5% atau $< 0,05$ maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

3.6.1.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi sering terjadi pada bentuk data dengan n-sampel yang berupa periode waktu (*time series*) seperti halnya data pada penelitian ini. Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel pengganggu (ϵ_t) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (ϵ_{t-1})⁸⁰. Jika terdapat korelasi antara variabel pengganggu (ϵ_t) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (ϵ_{t-1}) maka dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki masalah autokorelasi, dan apabila tidak terdapat korelasi maka model regresi tersebut dinyatakan baik.

Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Regresi Linear dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Pengambilan keputusan autokorelasi menggunakan uji regresi linear didasarkan pada pengukuran nilai Durbin Waston sebagai berikut:

Gambar 3.1: Pengukuran Durbin Waston



⁷⁹ Bhuono Agung Nugroho, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005).h. 18-19

⁸⁰ *Ibid*, h. 59.

Pada gambar tersebut terdapat istilah d_l atau d_{lower} , d_u atau d_{upper} dan d atau $d_{durbin\ waston}$. Autokorelasi tidak terjadi bila nilai $d_{durbin\ waston}$ berada diantara d_u dan $4-d_l$ ⁸¹.

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain sehingga dapat disebut sebagai homoskedastisitas⁸².

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pada *scatter plot* atau menggunakan uji Glejser dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Pengujian heteroskedastisitas dengan melihat pada *scatterplot* dapat diputuskan apabila model regresi linier berganda tidak terjadi heteroskedastisitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola

Kemudian pengambilan keputusan heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser didasarkan pada pengukuran nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas, dan apabila nilai signifikansi lebih

⁸¹ Fridayana Yudiaatmaja, *Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

⁸² Singgih Santoso, *Statistik Multivariat Dengan SPSS* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017).

dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau data dikatakan homokedastisitas.

3.6.1.4 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan linier atau kemiripan antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Uji ini bertujuan untuk menghindari adanya kebiasaan dalam proses mengambil kesimpulan pada uji parsial masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen)⁸³. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi linear antara variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilakukan menggunakan uji Regresi Linear dengan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Pengambilan keputusan multikolinearitas menggunakan uji Regresi Linear didasarkan pada pengukuran nilai tolerance dan Varians Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan, apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, sehingga untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukanlah uji regresi linear berganda dengan model persamaan sebagai berikut⁸⁴.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

⁸³ *Ibid*, h. 58.

⁸⁴ *Ibid*, h. 43-44.

α = Nilai Konstanta.

β = Nilai Koefisien regresi.

Regresi linear digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Gujarati (2006) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan⁸⁵.

a. Koefisien Determinan (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat dalam tentangan nilai diantara 0 sampai 1. Nilai R Square dikatakan baik jika di atas 0,5 pada umumnya penggunaan data *time series* akan menghasilkan R Square di atas 0,5 dibandingkan menggunakan data berbentuk *crosssection*⁸⁶.

b. Uji Parsial (T-Test)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji parsial menggunakan uji t, apabila nilai p-value < tingkat signifikansi 5 persen, sedangkan t-hitung > t-tabel dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari masing- masing variabel bebas terhadap variabel terikat⁸⁷.

c. Uji Simultan (F-Test)

Uji simultan digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, jika p-value < *level of significant* yang ditentukan, atau F hitung > F tabel maka berarti kedua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen⁸⁸.

⁸⁵ Jonathan Sarwono, Herlina Budiono, *Statistik Terapan Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis Dan Disertasi Menggunakan SPSS, AMOS Dan Excel* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012).

⁸⁶ *Ibid*, h. 51

⁸⁷ *Ibid*, h. 54-55.

⁸⁸ *Ibid*, h. 53-54.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Pada bagian ini akan dideskripsikan data masing-masing variabel pada penelitian ini yang terdiri dari satu data variabel terikat (dependen) yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tiga data variabel bebas (independen) yaitu Jumlah Kantor Bank Syariah, Total pembiayaan UMKM dan Total Pembiayaan Non UMKM. Berikut ini dalam tabel-tabel hasil analisis deskriptif masing-masing variabel yang meliputi jumlah data (N), rata-rata data (mean), nilai maximum dan nilai minimum.

Tabel 4.1: Hasil Uji Deskriptif Data

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kantor Bank Syariah	24	181	235	198,38
Pembiayaan UMKM	24	3776,67	7216,67	5081,0563
Pembiayaan non UMKM	24	3627,82	14715,72	10342,6779
PDRB Provinsi Jawa Tengah	24	185855,70	254548,10	218725,3213
Valid N (listwise)	24			

4.1.1 Jumlah Kantor Bank Syariah

Hasil uji deskriptif data pada tabel 4.1 Kantor Bank Syariah dalam satuan unit menunjukkan jumlah data (N) Kantor Bank Syariah yang terletak di provinsi Jawa Tengah selama periode 2014-2019 adalah 24 data, dengan nilai satuan terendah (*minimum*) sebesar 181, nilai satuan tertinggi (*maximum*) sebesar 235 dan rata-rata sataun (*mean*) sebesar 198,38.

4.1.2 Pembiayaan UMKM

Hasil uji deskriptif data pada tabel 4.1 Pembiayaan UMKM dalam satuan miliar rupiah menunjukkan jumlah data (N) Pembiayaan UMKM disalurkan oleh Bank Syariah yang terletak di provinsi Jawa Tengah selama periode 2014-2019 adalah 24 data, dengan nilai satuan terendah (*minimum*) sebesar 3776,67, nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 7216,67 dan rata-rata (*mean*) sebesar 5081,0563.

4.1.3 Pembiayaan Non UMKM

Hasil uji deskriptif data pada tabel 4.1 Pembiayaan non UMKM dalam satuan miliar rupiah menunjukkan jumlah data (N) Pembiayaan non UMKM disalurkan oleh Bank Syariah yang terletak di provinsi Jawa Tengah selama periode 2014-2019 adalah 24 data, dengan nilai satuan terendah (*minimum*) sebesar 3627,82, nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 14715,72 dan rata-rata (*mean*) sebesar 10342,6779.

4.1.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah

Hasil uji deskriptif data pada tabel 4.1 PDRB Provinsi Jawa Tengah menunjukkan jumlah data dalam satuan miliar rupiah menunjukkan jumlah data (N) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah selama periode 2014-2019 adalah 24 data, dengan nilai terendah (*minimum*) 185855,70, nilai tertinggi (*maximum*) 254548,10 dan nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan 218725,3213.

4.2 Uji Asumsi Klasik

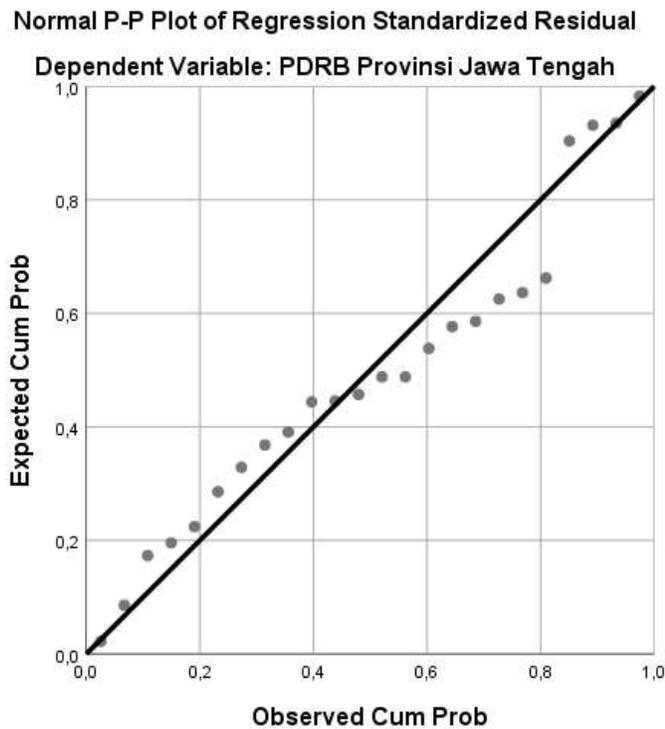
4.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki data yang berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki variabel dengan data yang berdistribusi normal. Normalitas data pada penelitian ini dapat dilihat dari hasil

pengujian menggunakan Grafik Normal *Probability Plot* dan *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* atau uji K-S.

Pengambilan keputusan uji normalitas menggunakan Grafik Normal *Probability Plot* didasarkan pada alur titik data yang mengikuti atau di sekitar garis diagonal, apabila titik data menjauh atau melebar dari garis diagonal dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas menggunakan Grafik Normal *Probability Plot* perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 4.1: Grafik Normal Probability Plot



Grafik Normal *Probability Plot* di atas menunjukkan pola data yang berdistribusi normal. Dapat dilihat bahwa titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya sehingga menunjukkan pola distribusi data yang normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test atau biasa dikenal dengan sebutan Uji K-S berfungsi untuk menguji normalitas data melalui nilai

residualnya. Pengambilan keputusan normalitas data dalam uji K-S didasarkan pada nilai signifikansi residual data yang berada di atas 0,05 maka apabila nilai signifikansi residual data berada di bawah 0,05 dapat diartikan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3984,45101444
Most Extreme Differences	Absolute	,160
	Positive	,160
	Negative	-,085
Test Statistic		,160
Asymp. Sig. (2-tailed)		,113 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi residual adalah $0,113 > 0,05$ yang artinya telah memenuhi syarat normalitas data melalui *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* atau uji K-S.

5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara variabel pengganggu (et) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya ($et-t$). Dalam pengujian regresi linier, autokorelasi seringkali terjadi pada data dengan model *time series* n-sampel adalah periode waktu

sebagaimana data yang digunakan pada penelitian ini. Sedangkan untuk sampel data *crosssection* dengan n-sampel item jarang terjadi, karena variabel pengganggu item sampel yang satu berbeda dengan yang lain.

Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Waston menggunakan bantuan SPSS. Model regresi linier berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Waston hitung terletak di daerah *No Autocorelasi*. Penentuan letak tersebut dibantu dengan tabel *dl* dan *du* dan nilai *k* (jumlah variabel independen)

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,961	,955	4272,84769	1,921

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan non UMKM, Pembiayaan UMKM, Kantor Bank

Syariah

b. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

$$k = 2, n = 24$$

$$dl = 1,188$$

$$4 - dl = 4 - 1,188 = 2,812$$

$$du = 1,546$$

$$4 - du = 4 - 1,546 = 2,454$$

$$d = 1,921$$

$$1,546 < 1,921 < 2,454 = du < d < 4-du$$

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui nilai *d* sebesar 1,921. Berdasarkan pengambilan keputusan melalui kriteria $du < d < 4-du$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data tersebut.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

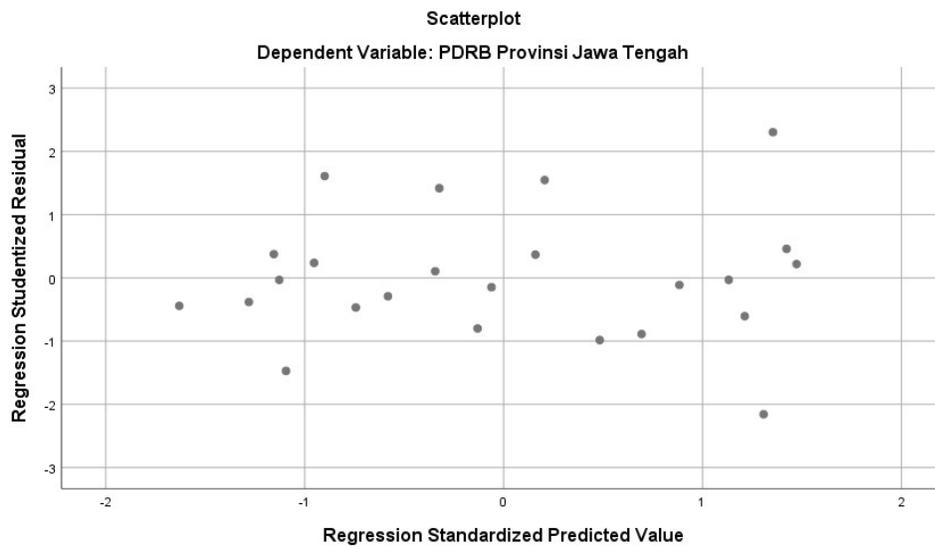
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance residual* pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi

yang baik adalah yang memiliki persamaan variance residual pada suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Deleted Residual* sehingga dapat dikatakan model tersebut homokedastisitas.

Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pada pola gambar *Scatterplot* yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terjadi heterokedastisitas apabila:

- e. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0
- f. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja
- g. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- h. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola

Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas



Selain itu juga dapat diukur menggunakan uji Glesjer dengan melihat hasil nilai signifikansinya

Tabel 4.4 Uji Glesjer

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6486,386	12748,945		,509	,616
	Kantor Bank Syariah	-14,456	44,558	-,097	-,324	,749
	Pembiayaan UMKM	-,560	,842	-,154	-,665	,514
	Pembiayaan non UMKM	,201	,253	,223	,795	,436

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan *Scatterplot* menggambarkan penyebaran titik yang sesuai dengan ciri-ciri tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi linear penelitian ini. Begitu pula pada hasil uji glesjer menunjukkan nilai signifikansi pada seluruh variabel diatas 0,05 maka model regresi linear dinyatakan homokesdatisitas.

4.2.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Adanya kemiripan variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi antar variabel independen, selain itu uji multikolinearitas juga bertujuan untuk menghindari kebiasa dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1.

Tabel 4.5: Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	141925,014	19550,056		7,260	,000		
Kantor Bank Syariah	-49,893	68,328	-,045	-,730	,474	,512	1,954
Pembiayaan UMKM	4,753	1,291	,176	3,680	,001	,847	1,180
Pembiayaan non UMKM	6,048	,387	,904	15,615	,000	,581	1,722

a. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji tersebut menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,512 pada variabel Kantor Bank Syariah, kemudian 0,847 pada variabel Pembiayaan UMKM dan 0,581 pada variabel Pembiayaan non UMKM yang mana nilainya lebih tinggi dari 0,1. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan nilai 1,954 pada variabel Kantor Bank Syariah, kemudian 1,180 pada variabel pembiayaan UMKM dan 1,722 pada variabel pembiayaan non UMKM yang mana tidak kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data model regresi linear ini tidak terdapat multikolinearitas.

4.3 Regresi Linear Berganda

Tahap pengujian selanjutnya adalah pengujian regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain dalam hal ini antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6: Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	141925,014	19550,056		7,260	,000		
Kantor Bank Syariah	-49,893	68,328	-,045	-,730	,474	,512	1,954
Pembiayaan UMKM	4,753	1,291	,176	3,680	,001	,847	1,180
Pembiayaan non UMKM	6,048	,387	,904	15,615	,000	,581	1,722

a. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

Hasil pengujian regresi linear berganda dengan variabel dependen (Y) Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah dan variabel independen (X1) Kantor Bank Syariah, (X2) Pembiayaan UMKM lalu (X3) Pembiayaan Non UMKM pada penelitian ini menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 141925,014 - 49,893 X1 + 4,753 X2 + 6,048 X3 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan:

- a. Nilai konstanta adalah 141925,014 yang berarti bahwa jika variabel jumlah kantor bank syariah, pembiayaan UMKM dan pembiayaan non UMKM bernilai konstan atau nol, maka nilai dari variabel Y atau PDRB Jawa Tengah adalah Rp 141.925,014 miliar.
- b. Nilai koefisien regresi variabel jumlah kantor bank syariah adalah -49,893 diartikan bahwa setiap penambahan 1 unit kantor bank syariah dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap, maka dapat menurunkan nilai PDRB Jawa Tengah sebesar Rp 49,893 miliar.
- c. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan UMKM adalah 4,753 diartikan bahwa setiap penambahan Rp 1 miliar pembiayaan UMKM dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap, maka dapat meningkatkan nilai PDRB Jawa Tengah sebesar Rp 4,753 miliar.

- d. Nilai koefisien regresi variabel pembiayaan non UMKM adalah 6,048 diartikan bahwa setiap penambahan Rp 1 miliar pembiayaan non UMKM dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap, maka dapat meningkatkan nilai PDRB Jawa Tengah sebesar Rp 6,048 miliar.

4.4 Uji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah ditetapkan pada penelitian ini dapat diterima atau ditolak secara hitungan statistic. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Statistik R2 (*Adjusted R Square*), Uji t (parsial) dan Uji f (simultan).

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan seluruh variabel independen pada penelitian model regresi ini dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Hasil uji R Square dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,961	,955	4272,84769	1,921

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan non UMKM, Pembiayaan UMKM, Kantor Bank Syariah

b. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil uji koefisien determenasi (R2) yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,955 dapat dijelaskan bahwa ketiga variabel independen (kantor bank syariah, pembiayaan UMKM dan pembiayaan non UMKM) memiliki kemampuan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,955 atau 95,5 persen. Berdasarkan angka tersebut dapat

disimpulkan bahwa 95,5 persen variasi variabel PDRB Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu kantor bank syariah, pembiayaan UMKM dan pembiayaan non UMKM sedangkan 4,5 persen lainnya dapat dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model yang merupakan kontribusi variabel bebas di luar ketiga variabel independen yang digunakan pada penelitian model regresi ini.

4.4.2 Uji Simultan (f)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen pada penelitian model regresi ini secara bersamaan (simultan) terhadap variabel independen. Hasil pengujian simultan (f) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9: Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9015824134,663	3	3005274711,554	164,607	,000^b
	Residual	365144547,390	20	18257227,369		
	Total	9380968682,052	23			

a. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan non UMKM, Pembiayaan UMKM, Kantor Bank Syariah

$$F \text{ tabel} = k ; n-k = 3 ; 24-3 = 3 ; 21 = 3,07$$

Berdasarkan hasil uji f dalam tabel diperoleh nilai F hitung sebesar $164,607 > F \text{ tabel } 3,07$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa secara simultan seluruh variabel independen (Kantor Bank Syariah, Pembiayaan UMKM, Pembiayaan non UMKM) pada penelitian model regresi ini memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap variabel dependen (PDRB Provinsi Jawa Tengah).

4.4.3 Uji Parsial (t)

Uji t parsial digunakan untuk menguji seberapa jauh signifikansi pengaruh tiap – tiap variabel independen pada penelitian model regresi

ini terhadap variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri. Hasil pengujian parsial (t) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	141925,014	19550,056		7,260	,000
Kantor Bank Syariah	-49,893	68,328	-,045	-7,730	,474
Pembiayaan UMKM	4,753	1,291	,176	3,680	,001
Pembiayaan non UMKM	6,048	,387	,904	15,615	,000

a. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

Rumus: $t \text{ tabel} = \alpha/2$; $n-k-1 = 0,05/2$; $24-3-1 = 0,025$; $20 = 2,085$

Diperoleh nilai t tabel adalah 2,085. Berdasarkan nilai t tabel dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1 (H1)

Hasil *coefficients* Kantor Bank Syariah Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah diperoleh nilai t hitung = -0,730 yang artinya $t \text{ hitung} < t \text{ tabel } 2,085$ dan untuk nilai signifikansinya adalah 0,474 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa jumlah kantor bank syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, maka H1 yang menyatakan bahwa “Jumlah kantor bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestik bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah” ditolak.

b. Pengujian Hipotesis 2 (H2)

Hasil *coefficients* Pembiayaan UMKM terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah diperoleh nilai t hitung = 3,680 yang artinya $t \text{ hitung} > t \text{ tabel } 2,085$ dan untuk nilai signifikansinya adalah 0,001

$< 0,05$ maka dapat diartikan bahwa pembiayaan UMKM memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, maka H2 yang menyatakan bahwa “Jumlah pembiayaan UMKM oleh bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestik bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah” diterima.

c. Pengujian Hipotesis 3 (H3)

Hasil *coefficients* Pembiayaan non UMKM terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah diperoleh nilai t hitung = 15,615 yang artinya $t \text{ hitung} > t \text{ tabel } 2,085$ dan untuk nilai signifikansinya adalah $0,000 < 0,05$ maka dapat diartikan bahwa pembiayaan UMKM memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, maka H3 yang menyatakan “Jumlah pembiayaan non UMKM oleh bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestik bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah” diterima.

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah di Jawa Tengah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah

Hasil pengujian data menggunakan analisis statistic dengan alat bantu *Statistical Package for the Social Sciences* atau SPSS Statistik versi 25, menghasilkan nilai koefisien pada variabel Jumlah Kantor Bank Syariah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah sebesar -49,893 dengan t hitung -0,730 dan probabilitas signifikansinya 0,474. Dengan batas signifikansi 0,05, diperoleh nilai t tabel 2,085 sehingga nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$). Kemudian nilai probabilitas signifikansinya 0,474 lebih besar dari batas signifikansi 0,05 ($0,474 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Kantor Bank Syariah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis menyatakan bahwa “Jumlah kantor bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestik bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah”, namun hipotesis tersebut ditolak karena berdasarkan hasil pengujian statistic jumlah kantor bank syariah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh negative namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Khairul Anwar (2017) yang menghasilkan pengaruh positif dan signifikan pada variabel jumlah kantor bank syariah dalam skala nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama periode 2004 - 2015. Pertentangan dua hasil pengujian tersebut didasarkan adanya perbedaan periode dan wilayah, pada penelitian ini, periode pengamatan adalah 2014 – 2019 dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian Khairul Anwar (2017) periode pengamatan adalah 2004 – 2015 dengan cakupan wilayah Negara Indonesia. Selain itu diketahui bahwa pada periode 2004 – 2015 terjadi pertumbuhan jumlah kantor bank syariah yang cukup pesat di Indonesia, tercatat pada statistic perbankan syariah tahun 2004 hingga 2015 pertumbuhan jumlah kantor mencapai angka 2.116 unit kantor dari semula 355 unit kantor pada tahun 2004 menjadi 2.471 unit kantor pada tahun 2015 atau bertambah sekitar 596,01 persen, sedangkan pada periode 2014 – 2019 dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Tengah terjadi penurunan jumlah kantor bank syariah sebanyak 20 unit kantor dari semula 216 unit kantor pada triwulan I 2014 menjadi 196 unit kantor pada triwulan IV 2019. Memasuki era industry 4.0, penutupan kantor cabang bank tidak hanya terjadi di Jawa Tengah saja melainkan fenomena ini terjadi secara nasional OJK mencatatkan pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia selama periode awal 2014 hingga akhir 2019 ada 254 kantor bank syariah yang ditutup, Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisiner OJK menyatakan bahwa pelayanan yang dapat dilakukan secara online melalui teknologi digital menjadikan ekspansi bank melalui pembukaan kantor cabang baru tak lagi efektif bahkan memakan

biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk beroperasi secara optimal⁸⁹. Penerapan digital strategi pada era industry 4.0 yang dihiasi dengan fenomena distrupsi pada berbagaimacam aktivitas manusia menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan khususnya bidang perbankan. Berdasarkan hasil survey Pwc tahun 2018 tentang Digital Banking di Indonesia menyatakan bahwa 90% focus penerapan strategi digital perbankan ditujukan pada sector ritel (*consumer bank*) yang merupakan garda pertahanan stabilitas pelayanan keuangan dengan $\pm 86\%$ nasabahnya yang saat ini telah melakukan transaksi digital melalui aplikasi mobile banking dan sejenisnya⁹⁰. Bahkan opsi pembentukan digital branch telah diresmikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan meluncurkan panduan penyelenggaraan digital bank oleh bank umum pada tahun 2016. Melihat perkembangan digital bank dalam bentuk mobile banking, internet banking, ATM, bahkan digital branch yang sangat pesat menjadikan strategi ekspansi perbankan berpindah dari yang semula dilakukan dengan cara pembukaan kantor-kantor pelayanan menjadi penyediaan akses pelayanan keuangan melalui teknologi digital yang dirasa lebih memberikan dampak efektif dan efisien bagi perbankan. Menurut Asti Marlina (2018) berdasarkan hasil penelitiannya mengenai digitalisasi bank terhadap peningkatan pelayanan dan kepuasan nasabah bank di BTN Syariah menunjukkan bahwa penggunaan digital banking selain dampak positifnya bagi perbankan, juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan bagi para nasabah⁹¹. Selain dampaknya pada penutupan kantor pelayanan bank syariah, strategi digital juga memiliki dampak pada penyerapan tenaga kerja oleh bank syariah. Peran pelayanan (*service*) yang digantikan oleh mesin dan teknologi menjadikan kuantitas Sumber Daya Manusia tidak lagi dibutuhkan, melainkan penyerapan tenaga kerja lebih terfokus pada kualitas Sumber Daya Manusia. Otoritas Jasa

⁸⁹ Valenta, "Semakin Sepi Peminat, Jumlah Kantor Cabang Bank Menurun."

⁹⁰ pwc, *Pwc Survey: Digital Banking in Indonesia 2018*, 2018.

⁹¹ Asti Marlina, Widhi Ariyo Bimo, "Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank," *Jurnal Ilmiah Inovator* 7, no. 1 (2018).

Keuangan mencatatkan pada Statistik Perbankan Syariah 2019 bahwa penyerapan tenaga kerja BUS dan UUS tahun 2019 secara year on year hanya tumbuh 0,67 % dari semula 54.471 orang menjadi 54.840 orang, bahkan secara jangka panjang dari tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 976 orang.

Terlepas dari penerapan strategi digital, hasil pengujian pengaruh negative dan tidak signifikan pada variabel jumlah kantor bank syariah di provinsi Jawa Tengah terhadap PDRB provinsi Jawa Tengah sangat tepat, hal ini didasarkan pada hasil yang bertentangan dari konsep inklusi keuangan. Ketersediaan akses keuangan melalui bank syariah yang mudah menjadi indikator penting pada terciptanya inklusi keuangan. Indeks inklusi keuangan di Indonesia yang didasarkan pada hasil survey tahun 2019 masih berada di angka 76,19 persen yang artinya penetrasi lembaga keuangan di Indonesia masih belum maksimal dan memerlukan adanya perbaikan. Kemudian pengaruh negative dan tidak signifikan pada variabel jumlah kantor bank syariah di Jawa Tengah menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya perbaikan dalam penetapan dan penempatan jumlah kantor di Provinsi Jawa Tengah.

4.5.2 Pengaruh Pembiayaan UMKM di Jawa Tengah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah

Hasil pengujian data ini menghasilkan nilai koefisien pada variabel Pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh Bank Syariah di Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,753 dengan t hitung 3,680 dan probabilitas signifikansinya 0,001. Dengan batas signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel 2,085 sehingga nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$), kemudian nilai probabilitas signifikansinya 0,001 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh Bank Syariah di Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis menyatakan bahwa “Jumlah pembiayaan UMKM oleh bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestic bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah”, hipotesis tersebut diterima sebagaimana pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Safaah Restuning (2014), Joko Susilo (2015), Rizfa Faiza (2016), Atika (2017), Sinta Rani (2016), Haqiqi Rafsanjani (2014), namun bertentangan dengan penelitian Zaini Ibrahim (2015) yang menjelaskan pada uji parsial variabel pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDRB Provinsi Banten.

Hasil pengujian pengaruh positif dan signifikan pada variabel pembiayaan UMKM oleh bank syariah di provinsi Jawa Tengah terhadap PDRB provinsi Jawa Tengah sangat tepat, hal ini didasarkan pada hasil yang sesuai dengan indikator inklusi keuangan. Pemanfaatan fasilitas keuangan yang disediakan bank syariah secara menyeluruh menjadi indikator penting akan terciptanya inklusi keuangan. Ketersediaan fasilitas keuangan khususnya pada pembiayaan UMKM dapat menjadi pintu permodalan bagi usaha-usaha yang masih pada tingkat kecil hingga menengah sehingga dapat lebih berkembang dan dapat meningkatkan produktifitasnya. Perkembangan UMKM dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita. Secara makro, peningkatan produktifitas UMKM dapat mendorong laju perkembangan ekonomi di daerah tersebut melalui pajak dan produksi untuk mendongkrak PDRB daerah tersebut.

4.5.3 Pengaruh Pembiayaan Non UMKM di Jawa Tengah terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah

Hasil pengujian data ini menghasilkan nilai koefisien pada variabel Pembiayaan Non UMKM yang disalurkan oleh Bank Syariah di Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,048 dengan t hitung 15,615 dan probabilitas signifikansinya 0,000. Dengan batas signifikansi 0,05 diperoleh nilai t tabel 2,085 sehingga nilai t hitung lebih besar dari t

tabel ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$), kemudian nilai probabilitas signifikansinya 0,000 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pembiayaan Non UMKM yang disalurkan oleh Bank Syariah di Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis menyatakan bahwa “Jumlah pembiayaan non UMKM oleh bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestik bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah”, hipotesis tersebut diterima sebagaimana pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Safaah Restuning (2014), Joko Susilo (2015), Rizfa Faiza (2016), Atika (2017), Sintia Rani (2016), Haqiqi Rafsanjani (2014), namun bertentangan dengan penelitian Zaini Ibrahim (2015) yang menjelaskan pada uji parsial variabel pembiayaan bank syariah tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDRB Provinsi Banten.

Hasil pengujian pengaruh positif dan signifikan pada variabel pembiayaan non UMKM oleh bank syariah di provinsi Jawa Tengah terhadap PDRB provinsi Jawa Tengah sangat tepat, hal ini didasarkan pada hasil yang sesuai dengan indikator inklusi keuangan. Pemanfaatan fasilitas keuangan yang disediakan bank syariah secara menyeluruh menjadi indikator penting akan terciptanya inklusi keuangan. Selain UMKM, Sektor non UMKM juga memiliki peranan besar dalam perkembangan perekonomian daerah baik dari segi produksi, pajak hingga ketersediaan lapangan pekerjaan, maka dari itu penyaluran pembiayaan non UMKM oleh bank syariah khususnya di Provinsi Jawa Tengah sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan dan produktifitas perusahaan non UMKM demi terciptanya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda mengenai pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah, Pembiayaan UMKM dan Non UMKM yang disalurkan Bank Syariah di provinsi Jawa Tengah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Jumlah Kantor Bank Syariah di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian maka hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa “Jumlah kantor bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestic bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah” ditolak.
2. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Jumlah Pembiayaan UMKM yang disalurkan Bank Syariah di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian maka hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa “Jumlah pembiayaan UMKM oleh bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestic bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah” diterima.
3. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Jumlah Pembiayaan Non UMKM yang disalurkan Bank Syariah di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian maka hipotesis 3 (H3) yang menyatakan bahwa “Jumlah pembiayaan Non UMKM oleh bank syariah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif terhadap produk domestic bruto regional (PDRB) Provinsi Jawa Tengah” diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan data penelitian yang diperoleh dari data sekunder melalui laporan Statistik yang dipublikasikan oleh website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah yang diakibatkan adanya perubahan format laporan dan perhitungan tahun dasar.
2. Keterbatasan detail data berupa alamat kantor bank syariah di Provinsi Jawa Tengah yang ditutup selama tahun 2014-2019.

5.3 Saran

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya
 1. Indikator keuangan inklusi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memiliki tiga macam yaitu akses (*access*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*). Pada penelitian ini masih hanya menggunakan dua indikator yaitu akses dan penggunaan, untuk itu akan lebih baik jika peneliti selanjutnya menambahkan indikator kualitas (*quality*) pelayanan keuangan melalui bank syariah sehingga dapat mewakili kualitas inklusi keuangan di Provinsi Jawa Tengah.
 2. Variabel yang berkaitan dengan *financial technology* pada bank syariah belum diikutsertakan pada penelitian ini, padahal salah satu penyebab ditutupnya kantor bank syariah adalah kehadiran *financial technology* berupa ATM, m-banking dan internet banking yang memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. Untuk itu akan lebih baik jika peneliti selanjutnya mensertakan variabel yang berkaitan dengan *financial technology* bank syariah yang juga menawarkan kemudahan pada akses, penggunaan dan kualitas pelayanan.
- b. Bagi Bank Syariah di Jawa Tengah
 1. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah pada Desember 2019 menunjukkan bahwa dominasi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah adalah pada sector Rumah Tangga – Untuk Pemilikan Rumah Tinggal sebesar 26,32 persen dilanjutkan pada industry pengolahan dan perdagangan sebesar 17,99 persen dan 11,33 persen. Sedangkan untuk kegiatan pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan yang kebanyakan bertempat di pedesaan hanya menyerap 0,98 persen (pertanian, perburuan dan kehutanan) dan 0,14 persen

untuk perikanan. Padahal sector pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi peringkat ketiga kontribusi pada PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 13,52 persen. Berdasarkan data tersebut dapat disampaikan bahwa aksesibilitas sector pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan terhadap bank syariah di provinsi Jawa Tengah masih cukup rendah sehingga disarankan untuk memperbaiki akses pelayanan keuangan untuk sector pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan.

2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan kantor bank syariah dimulai dari pemilihan lokasi yang tepat untuk bisa menjangkau lapisan masyarakat yang belum mengakses layanan keuangan melalui teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Nurhajati dan Dudung. “Kajian Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah: Studi Kasus Bank BNI Syariah.” *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 1 (2013).
- Al-Qazuni, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, n.d.
- Anggraeni, Herdiana Puspitasari, dkk, Lukytawati. “Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor.” *Jurnal al-Muzara’ah* 1, no. 1 (2013).
- Ansari, Leli Putri. “Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembayaran Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia : Studi . Kasus Bank Syariah Bukopin.” *Jurnal Ekombis* 3, no. 1 (2017).
- Anwar, Amri, Khairul. “PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PDB INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unsyiah* 2, no. 3 (2017).
- Atika. “Pengaruh Pembiayaan Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia Dilihat Dari Pertumbuhan PDB.” *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2017).
- Augustyn, Patricia Bauer, dkk, Adam. “Sir Roy Harrod British Economist.” *Britannica*. Britannica, n.d. <https://www.britannica.com/biography/Roy-Harrod>.
- Badan Pusat Statistik. *Seri 2010: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi 2010-2018*, 2019. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/956/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-2018-miliar-rupiah-.html>.
- . *Seri 2010: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi 2010-2018*, 2019. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/10/07/956/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-2018-miliar-rupiah-.html>.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. *PERKEMBANGAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR BESAR DAN SEDANG PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2019*, 2019.
- . *PERKEMBANGAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR KECIL DAN MIKRO PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2019*, 2019.
- . *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*, 2019.

<https://jateng.bps.go.id/publication/2019/07/05/bdea44fd01ce6dcde19fec6c/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-jawa-tengah-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html>.

- Bank Indonesia. *Statistik Bank Indonesia: Metadata Sekda Desember 2015, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)*, 2015.
<https://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/sekda/Contents/Default.aspx>.
- Bank Muamalat. “Pembiayaan IB Muamalat Multiguna.”
Www.Bankmuamalat.Co.Id. Accessed May 1, 2020.
<https://www.bankmuamalat.co.id/pembiayaan-consumer/pembiayaan-ib-muamalat-multiguna>.
- BRI Syariah. “KPR Sejahtera BRISyariah IB.” *Www.Brisyariah.Co.Id*. Accessed May 1, 2020. <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=12>.
- . “Pembiayaan Komersial.” *Www.Brisyariah.Co.Id*. Accessed May 1, 2020. <https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=42>.
- BTN Syariah. “Pembiayaan Investasi BTN IB.” *Www.Btn.Co.Id*. Accessed May 1, 2020. <https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home/Syariah-Data-Sources/Product-Links-Syariah/Produk-BTN-Syariah/kredit-komersial/Pembiayaan-Usaha/Pembiayaan-Investasi-BTN--iB>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. *UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah: Pasal 2 Ayat 2-3*, 2004. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.
- Dinkop-UMKM Provinsi Jawa Tengah. *Data Koperasi & UMKM Triwulan I 2018*, 2018. <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/content/index/2/73/6/data-koperasi-umkm>.
- . *Data UMKM Binaan Triwulan IV 2018*, 2018.
- Dz, Abdus Salam. “Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi Dan Tantangan.” *Al Amwal* 10, no. 1 (2018).
- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa. “Pengaruh Alokasi Pembiayaan Sektor – Sektor Ekonomi Oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur (Periode Triwulan Tahun 2010-2015).” *el-Qist* 6, no. 2 (2016).
- Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, Dessy Noor Farida, Noor. “The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance.” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019).
- Farukhi, Moh. *Mengenal 34 Provinsi Indonesia: Jawa Tengah*. Surakarta: Sinergi Prima Magna, 2018.
- Fathimah, Vidya. “Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Di Sumatera Utara.” *Jurnal Ilman* 5, no. 1 (2017).
- Filbert, Ryan. *Bangun Kekayaan, Investasi Properti*. Jakarta: PT Elex Media

- Komputindo, 2015.
- Fitri dan Nur Qamariah, Nurul. "PEMANFAATAN INTERNET BANKING DAN AUTOMATIC TELLER MACHINE TERKAIT PENINGKATAN USAHA OLEH PELAKU UMKM PASAR INDUK WONOMULYO." *Sebatik* 23, no. 2 (2019).
- Hidayah, Nurul. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016." *Jurnal Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2017).
- Ibrahim, Zaini. "Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Banten." *Jurnal Islamiconomic* 6, no. 1 (2015).
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah!* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Ikatan Bangkir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Van Indra, Rachmad Kresna Sakti, Wiguna. "ANALISIS PENGARUH PDRB, PENIDIDKAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005-2010." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, FEB* 1, no. 2 (2012).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jazuli Rahman, Aris Soelistyo, Syamsul Hadi, Ahmad. "PENGARUH INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI BANTEN TAHUN 2010-2014." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14, no. 1 (2016). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3890>.
- Kurnia Rizki, Ratno Agriyanto, Dessy Noor Farida, Mita. "The Effect of Sustainability Report and Profitability on Company Value: Evidence from Indonesian Sharia Shares." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 117–140.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Al-Quran Tematik, Jilid 2*. Bandung: Kamil Pustaka, 2018.
- Maharani, Dewi. "Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sumatera Utara." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* (2016).
- Mandiri Syariah. "Pembiayaan Kendaraan Bermotor." *Www.Mandirisyariah.Co.Id*.
- . "Pembiayaan Usaha Mikro." *Www.Mandirisyariah.Co.Id*. Accessed May 1, 2020. <https://www.mandirisyariah.co.id/business-banking/micro-banking/pembiayaan-usaha-mikro>.
- Marlina, Widhi Ariyo Bimo, Asti. "Digitalisasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank." *Jurnal Ilmiah Inovator* 7, no. 1 (2018).

- Meliyana, dan Ade Sofyan Mulazid, Dita. “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil Dan Jumlah Kantor Terhadap Jumlah Deposito Mudarabah Bank Syariah Di Indonesia Periode 2011-2015.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017).
- Murpi, Dea Tanyo Iskandar, Solehudin. *Manajemen Bisnis Untuk Orang Awam*. Bekasi: Laskar Aksara, 2011.
- Murtadho, Ali. *Model Aplikasi Fiqh Muammalah Modern*. Semarang: Pustaka Zaman, 2015.
- Nugroho, Bhuono Agung. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005.
- Nurita, Dewi. “Jokowi Soroti Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan RI Yang Rendah.” *Tempo.Co*, January 28, 2020.
<https://bisnis.tempo.co/read/1300621/jokowi-soroti-indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-ri-yang-rendah/full&view=ok>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *SP 58/DHMS/OJK/XI/2019 SIARAN PERS SURVEI OJK 2019: INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MENINGKAT*, 2019.
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-Meningkat.aspx>.
- . *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.93/2016 Tentang: Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti*, 2016.
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Pembukaan-Jaringan-Kantor-Bank-Umum-Berdasarkan-Modal-Inti>.
- Purwanto. “Kontribusi Pembiayaan Yang Diberikan Oleh Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Pulau Jawa Dan Sumatra Tahun 2012 – 2016.” *Iqtidhadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2017).
- pwc. *Pwc Survey: Digital Banking in Indonesia 2018*, 2018.
- Rafsanjani, Haqiqi dan Raditya Sukmana. “Pengaruh Perbankan Atas Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)* 12, no. 3 (2014).
- Rahadian, Lalu. “2020, Bank Syariah Memilih Pembiayaan Sektor Ritel.” *Bisnis.Com*. Last modified 2020. Accessed June 1, 2020.
<https://finansial.bisnis.com/read/20200106/90/1187298/2020-bank-syariah-memilih-pembiayaan-sektor-ritel>.
- Rani Siti Sarah, Sumiyarti, Sinta. “Pengaruh Penyaluran Dana Bank Konvensional Dan Bank Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia.” *Media Ekonomi* 24, no. 2 (2016).
- Rijal, Agus. *Investasi Cerdas Bukan Warisi Utang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Roger, dkk, Wendy A. “Survey of Automatic Teller Machine Usage across the

- Adult Life Span.” *Sage Journal* 38, no. 1 (1996).
- Salim, Uthiah Muhammad. “Uthiah Muhammad Salim, Kitab Al-Buyu’: Bab- Alqirodh.” *Islamweb.Net*. Accessed April 29, 2020. <https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=135048>.
- Santoso, Singgih. *Statistik Multivariat Dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Sarwono, Herlina Budiono, Jonathan. *Statistik Terapan Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis Dan Disertasi Menggunakan SPSS, AMOS Dan Excel*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Seran, Sirilius. , *Pendidikan & Pertumbuhan Ekonomi Versus Kemiskinan Penduduk: Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank Syariah & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Susanto, Heru. *Cerdas Memilih Investasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Susilo, Ratnawati Nirdukita, Joko. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB): Analisis Sektoral Tahun 2006-2013.” *Seminar Nasional Cendekiawan* (2015).
- Suyonto, Danang. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Alat Statistik & Analisis Output Komputer*. Sleman: CAPS, 2011.
- Syafputri, Ella. *Investasi Emas, Dinar & Dirham*. Depok: Penebar Plus+, 2012.
- Valenta, Elisa. “Semakin Sepi Peminat, Jumlah Kantor Cabang Bank Menurun.” *Beritagar.Id*. Last modified November 18, 2019. Accessed May 6, 2020. <https://beritagar.id/artikel/berita/semakin-sepi-peminat-jumlah-kantor-cabang-bank-menurun>.
- Wahid, Nusron. *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yudiatmaja, Fridayana. *Analisis Regresi Dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik SPSS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Yusuf, Mari. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- “Esvey D. Domar 1914-1997.” *THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT WEBSITE*. hetwebsite.net, n.d. <https://www.hetwebsite.net/het/index.htm>.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Jumlah Kantor Bank Syariah, Jumlah Pembiayaan UMKM, Jumlah Pembiayaan non UMKM dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019 (per triwulan)

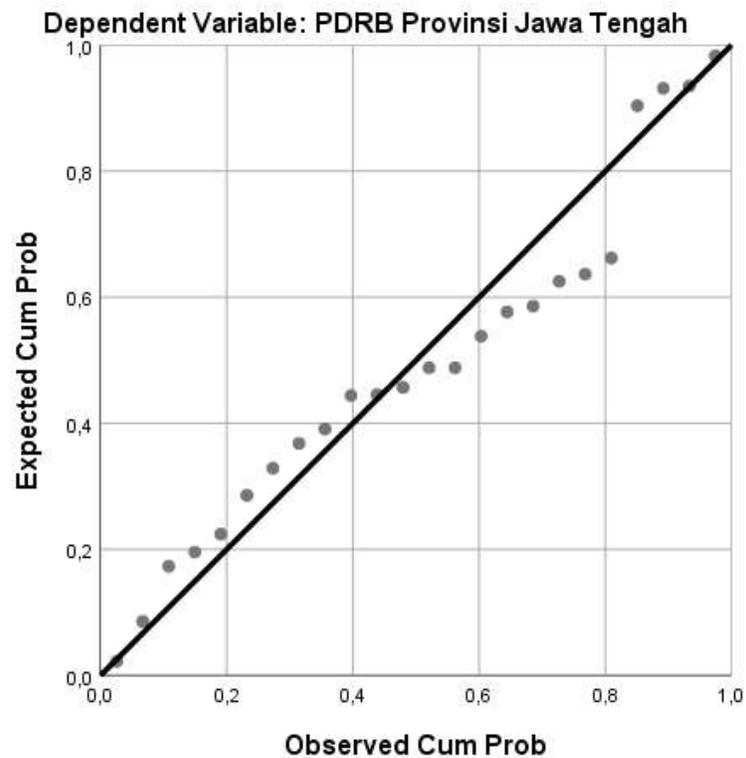
Tahun	Triwulan	Jumlah Kantor X1	Pembiayaan UMKM (Rp miliar) X2	Pembiayaan non UMKM (Rp Miliar) X3	PDRB (Rp Miliar) Y
2014	I	235	7.216,67	3.627,82	185855,70
	II	235	4.348,68	7.027,18	191925,20
	III	235	3.776,67	7.888,50	197218,80
	IV	216	4.099,12	7.678,06	191218,80
2015	I	219	4.015,13	7.658,17	196265,90
	II	218	3.899,43	8.313,52	200785,96
	III	211	4.181,86	8.207,31	207373,58
	IV	197	4.750,21	8.158,65	202118,50
2016	I	186	5.035,54	8.430,58	206030,98
	II	184	5.296,00	8.912,23	212320,92
	III	187	5.178,75	9.071,46	217883,90
	IV	181	5.523,76	9.463,77	212893,60
2017	I	193	5.425,69	9.770,32	216916,59
	II	182	5.643,98	10.304,59	223379,52
	III	182	5.608,81	10.509,22	229158,61
	IV	186	5.349,57	11.570,39	224269,53
2018	I	184	5.206,07	12.396,47	228796,00
	II	184	5.379,50	12.881,44	235751,87
	III	184	5.294,62	13.760,35	240997,89
	IV	189	5.160,39	14.481,67	236017,91
2019	I	192	5.263,39	14.114,76	240302,67
	II	192	5.499,69	14.617,85	248673,61
	III	193	5.166,12	14.664,24	254548,10
	IV	196	5.625,70	14.715,72	248703,57

Lampiran 2: Hasil Uji Deskriptif Data

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kantor Bank Syariah	24	181	235	198,38
Pembiayaan UMKM	24	3776,67	7216,67	5081,0563
Pembiayaan non UMKM	24	3627,82	14715,72	10342,6779
PDRB Provinsi Jawa Tengah	24	185855,70	254548,10	218725,3213
Valid N (listwise)	24			

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 3: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3984,45101444
Most Extreme Differences	Absolute	,160
	Positive	,160
	Negative	-,085
Test Statistic		,160
Asymp. Sig. (2-tailed)		,113 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 4: Hasil Uji Autokorelasi

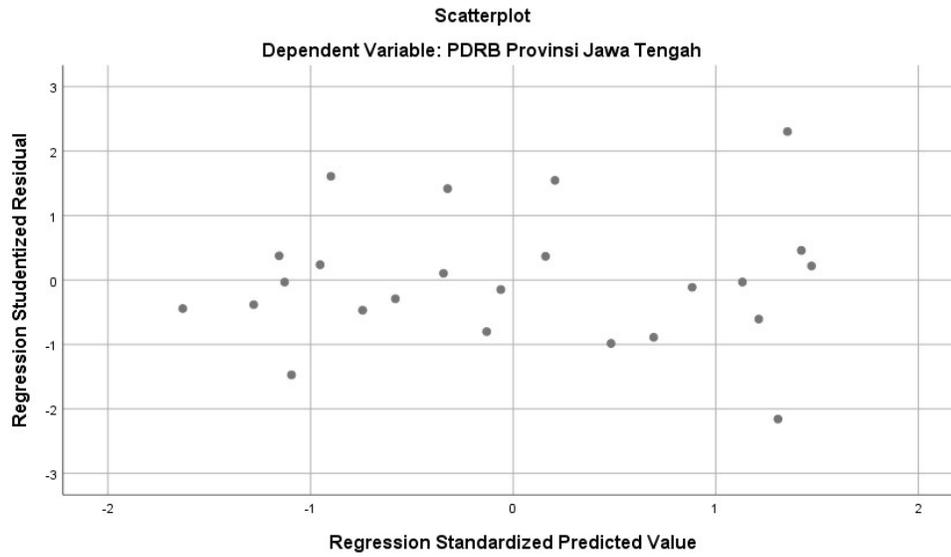
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,961	,955	4272,84769	1,921

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan non UMKM, Pembiayaan UMKM, Kantor Bank Syariah

b. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 5: Hasil Uji Heteroskedastisitas



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	6486,386	12748,945		,509	,616
	Kantor Bank Syariah	-14,456	44,558	-,097	-,324	,749
	Pembiayaan UMKM	-,560	,842	-,154	-,665	,514
	Pembiayaan non UMKM	,201	,253	,223	,795	,436

a. Dependent Variable: ABRESID

Lampiran 6: Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	141925,014	19550,056		7,260	,000		
Kantor Bank Syariah	-49,893	68,328	-,045	-,730	,474	,512	1,954
Pembiayaan UMKM	4,753	1,291	,176	3,680	,001	,847	1,180
Pembiayaan non UMKM	6,048	,387	,904	15,615	,000	,581	1,722

c. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	141925,014	19550,056		7,260	,000		
Kantor Bank Syariah	-49,893	68,328	-,045	-,730	,474	,512	1,954
Pembiayaan UMKM	4,753	1,291	,176	3,680	,001	,847	1,180
Pembiayaan non UMKM	6,048	,387	,904	15,615	,000	,581	1,722

a. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 8: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,961	,955	4272,84769	1,921

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan non UMKM, Pembiayaan UMKM, Kantor Bank Syariah

b. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 9: Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9015824134,663	3	3005274711,554	164,607	,000^b
Residual	365144547,390	20	18257227,369		
Total	9380968682,052	23			

a. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

d. Predictors: (Constant), Pembiayaan non UMKM, Pembiayaan UMKM, Kantor Bank Syariah

Lampiran 10: Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	141925,014	19550,056		7,260	,000
	Kantor Bank Syariah	-49,893	68,328	-,045	-,730	,474
	Pembiayaan UMKM	4,753	1,291	,176	3,680	,001
	Pembiayaan non UMKM	6,048	,387	,904	15,615	,000

a. Dependent Variable: PDRB Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Darma Taujiharrahan
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 15 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. RM Hadi Soebeno Jatisari Baru 1 RT 01/03
Jatisari, Mijen Semarang
Email : taujiharrahandarma@gmail.com
No. Telp : 081310363458

DATA PENDIDIKAN

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Mijen Semarang, Tahun 2002-2004
2. SD Negeri Ngadirgo 03, Tahun 2004-2010
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Tahun 2010-2016
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2017-sekarang